KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2018

TENTANG

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Menimbang

- ea. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017;
 - b. bahwa dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sebagai pelaksanaan Peraturan Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir telah dengan Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017, perlu dilakukan penyesuaian format penghitungan dan surat ketetapan pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih;
 - bahwa dalam rangka penyederhanaan dan penyatuan peraturan mengenai Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan

Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5268);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);
- Peraturan 6. Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1645);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal 1

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-17/PJ/2018
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK SERTA
BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

NO.	Γ	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	T	2	3	4	5
I.	PPh	Badan/Orang Pribadi			
	1	STP/skp			
	l	a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1,77.	Folio	2 Lembar
II.	PPh	Pemotongan/Pemungutan		1 0110	2 IXIIIbai
	1	STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
- 1		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
- 1		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
- 1		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
m.	PPN			-	
	Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanf Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Bar Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.			as Aktiva Tetap yang arang Bawaan Orang	
Ī	1	STP/skp	I		
		a. STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
- 1	1	b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
	- 1	c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio	e
	- 1	c. old libi	111.2.20.	rono	5 Lembar
	- 1	d. SKPN	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar 4 Lembar

2 Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB 3 Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Peibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Rei 1 STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB		Folio	5 Lembar
b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.27. mungut Pajak, Perolehanteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar 2 Lembar nya Tidak Seharusny
c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Rei STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.77. mungut Pajak, Peroleharnteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Tolio Folio Folio	5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar 2 Lembar nya Tidak Seharusn
d. SKPN e. SKPLB 3 Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re 1 STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.27. mungut Pajak, Perolehanteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio rough yang PPnBM-rough	4 Lembar 4 Lembar 2 Lembar nya Tidak Seharusnya 5 Lembar
e. SKPLB Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Rei STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.77. mungut Pajak, Perolehanteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio yang PPnBM-r Folio	4 Lembar 2 Lembar nya Tidak Seharusn 5 Lembar
Nota Penghitungan PnBM tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.77. mungut Pajak, Perolehanteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Polio Folio	2 Lembar nya Tidak Seharusn 5 Lembar
tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	mungut Pajak, Perolehan nteng. F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	n yang PPnBM-r Folio	nya Tidak Seharusn 5 Lembar
tas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pe ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
ibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Re STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.23.		
b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23. F.4.2.23.		
c. SKPKBT d. SKPN	F.4.2.23.	Folio	1
d. SKPN			5 Lembar
	E4002	Folio	5 Lembar
e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar
	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar
2 Lampiran STP/skp			
a. STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
d. SKPN	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar
e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar
3 Nota Penghitungan	F,4.2.77.	Folio	2 Lembar
ea Meterai			
1 STP/skp			
a. STP	F.5.5.23.	Folio	5 Lembar
b. SKPKB	F.4.5.23.	Folio	5 Lembar
c. SKPKBT	F.4.5.23.	Folio	5 Lembar
d. SKPN	F.4.5.23.	Folio	4 Lembar
e. SKPLB	F.4.5.23.	Folio	4 Lembar
2 Lampiran STP/skp			
a. STP	F.5.5.23.	Folio	5 Lembar
b. SKPKB	F.4.5.23.	Folio	5 Lembar
c. SKPKBT	F.4.5.23.	Folio	5 Lembar
d. SKPN	F.4.5.23.	Folio	4 Lembar
e. SKPLB	F.4.5.23.	Folio	4 Lembar
3 Nota Penghitungan	F.4.5.77.	Folio	2 Lembar
ınga/Denda Penagihan			
1 STP	F.5.0.23.	Folio	4 Lembar
Nota Penghitungan	F.5.0.77.	Folio	2 Lembar
aftar Pengantar			
1 STP	D.4.0.77	Folio	2 Lembar
Nota Penghitungan	D.4.0.77	Folio	3/4 Lembar *)
embar Pengawasan			
STP dan/atau surat ketetapan pajak	L.5.0.23.	Folio	4 Lembar
Nota Penghitungan	L.5.0.77.	Folio	2 Lembar
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan a Meteral STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPLB Nota Penghitungan nga/Denda Penagihan STP Nota Penghitungan Nar Pengantar STP Nota Penghitungan Nar Pengawasan STP Nota Penghitungan STP Nota Penghitungan STP Nota Penghitungan STP Nota Penghitungan STP Nota Penghitungan	C. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB F.4.2.23. p. Nota Penghitungan STP/skp a. STP F.5.5.23. b. SKPKB F.4.5.23. c. SKPKBT d. SKPN F.4.5.23. e. SKPLB F.4.5.23. e. SKPLB F.4.5.23. c. SKPKBT f.4.5.23. c. SKPKBT f.4.5.23. c. SKPKBT f.4.5.23. c. SKPKBB F.4.5.23. c. SKPLB Nota Penghitungan F.4.5.77. c. SKPLB STP Nota Penghitungan F.5.0.77. Tear Pengawasan STP Nota Penghitungan D.4.0.77 Nota Penghitungan D.4.0.77 Nota Penghitungan D.4.0.77 Nota Penghitungan STP dan/atau surat ketetapan pajak Nota Penghitungan L.5.0.23. Nota Penghitungan STP dan/atau surat ketetapan pajak Nota Penghitungan L.5.0.23. Nota Penghitungan D.4.5.77.	C. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB F. 4.2.23. Folio F. 4.5.23. Folio F. 5.5.23. Folio



•••••

		PAJAK PEN	(HAN PAJAK IGHASILAN	
	mor sa/1	r : ` Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo	:
Ι. Т	elal	ah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksa	an bukper ¹⁾ atas pelaksanaan kew	ajiban Pajak Penghasilan:
N	lam	na Wajib Pajak :		
N	IPW	VP :		
		i penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ⁱ kut:	⁽⁾ tersebut di atas, jumlah yang r	masih harus dibayar adalah sebagai
	1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	ı	Rp/US\$ ¹⁾
:	2. '	Telah dibayar	F	Rp/US\$ ¹⁾
;	3. 1	Kurang dibayar (1-2)	F	Rp/US\$ ¹⁾
4	4. 9	Sanksi Administrasi:		
		 a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) 	Rp/US\$ ¹⁾	
		atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan ¹⁾		
		 Bunga Pasal 8 (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar 	Rp/US\$ ¹⁾	
		c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ¹⁾	
		d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp/US\$ ¹⁾	
		e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp/US\$ ¹⁾	
		f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp/US\$ ¹⁾	
	,	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampalan SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp/US\$ ¹⁾	
	ı	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	R	p/US\$ ¹⁾
5	. Jı	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	R	p/US\$ ¹⁾
_		Terbilang :		

Kepada	a.n. Direktur Jenderal Pajak
	Kepala Kantor/
	Kepala Seksi, ²⁾

Coret yang tidak perlu.
 Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK					
PAJAK PENGHASILAN					
Nomor	:				
Masa/Tahun Pajak	:				
Tanggal Penerbitan	:				
Tanggal Jatuh Tempo	£				

Nama Wajib Pajak : NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/U	S\$ ¹⁾ MENURUT
140.	UNAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Coret yang tidak perlu

F.5.1.23

*)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - untuk Seksi Penagihan; - lembar ke-2
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1		Pengisian	Data/Identitas
---	--	-----------	----------------

Nomor

- Masa/Tahun Pajak
- Tanggal Penerbitan
- Tanggal Jatuh Tempo
- Nama Wajib Pajak
- NPWP Kepada
- a.n.Direktur Jenderal Pajak
 - Kepala Kantor/ Kepala Seksi,

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.
- : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- : Cukup jelas
- : Cukup jelas
- : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran STP
- b. STP
- * Baris/No.Urut pada STP
- - dibayar
- 2 Telah dibayar
- 3 Kurang dibayar 4 Sanksi Administrasi
- 5 Jumlah yang masih harus dibayar

- Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- : Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
- 1 Angsuran/Pokok Pajak yang harus : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
 - : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
 - pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " " (strip). : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.

 - : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
 - : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
- Terbilang: : Cukup jelas.



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN				
Nomor :	Tanggal Penerbitan	:		
Tahun Pajak :	Tanggal Jatuh Tempo	:		
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksar Nama Wajib Pajak : NPWP :	naan kewajiban Pajak Penghasilan:			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut di atas, jumlah y	yang masih harus dibayar adalah seb	pagai berikut:		
 Penghasilan Neto Penghasilan Kena Pajak PPh terutang Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan ta Jumlah PPh terutang (3+4) 	l hun lalu	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾		
 6. Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾			
b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾			
c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾			
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) d. Diperhitungkan: d.1. SKPPKP e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ F	Rp/US\$ ¹⁾		
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e) 8. Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal	F	Rp/US\$ ¹⁾		
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ¹⁾		
Terbilang :				
 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan²⁾ 	Rp/US\$ ¹⁾			
Terbilang ²⁾ :				

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.²⁾

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.²⁾

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Baris ini tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KUKANG BAYAK						
PAJAK PENGHASILAN						
Nomor	;					
Tahun Pajak	:					
Tanggal Penerbitan	:					
Tanggal Jatuh Tempo	:					

Nama Wajib Pajak NPWP

NPW	P :			
		JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesualan fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22		Į.	
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)			
	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
- 1	b. Kenaikan Pasal	ATTENDED OF THE		
-	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			

- Coret yang tidak perlu
 Kolom ini tidak diisi dalam hai SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 untuk Seksi Pelayanan:

- lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- Kepada

4 0)anaicie	un Data/	Identitas

- Tanggal Jatuh Tempo

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Tahun Pajak

Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

2017

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Dilsi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

b. SKPKB : Cukup jelas. Dilsi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$

* MENURUT EISKUSI dengan pada pinangan pada pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$

Baris/No.Urut pada SKPKB

MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan

Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB.

l Penghasilan Neto/berdasarkan Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB. Norma(Jabatan)

Penghasilan Kena Pajak
 Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB.
 PPh Terutang
 Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB.

Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
 Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.

 Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.

yang telah diperhitungkan tahun lalu

5 Jumlah PPh terutang

6 Kredit Pajak

5 Dilsi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.

Ci Dilsi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.

Ci Dilsi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPKB.

7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB.

8 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPKB. Sanksi administrasi dapat berupa:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

d. Kenaikan Pasal 13A KUP
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesual dengan baris 21 Lampiran SKPKB.

- Terbilang: : Cukup jelas.

10 Jumlah kurang bayar yang disetujui : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH bardasadan Barbahasan Akhir Hasil DIIAN MARIN DIIT DIANAMAN AKHIR (DISTRIKUM)

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)* dengan Pemeriksaan.

Angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak delam bel SKRKR 4 attit berdasak angka 10 tidak terretak angka 10 tidak ter

 Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A.

 Dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (......)".

- Terbilang: : Cukup jelas.



.....

		PAJAK KURANG BAYAR TAN JAK PENGHASILAN	IBAHAN	
Nomor Tahun		Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo	:	
I To	elah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pela	aksanaan kewajihan Dajak Denghasila:	n'	
		resolitati kewajisan rajak rengilasilar		
	ama Wajib Pajak : PWP :			
II. Da	ari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut diatas, jum	lah yang masih harus dibayar adalah		
1	. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2	. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
	. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4	. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah di	iperhitungkan tahun lalu	Rp/US\$1)	
	Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$1)	
6	. Kredit Pajak:	43		
	a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$1)		
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	1)		
	b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾		
	b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
	b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾		
	b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾		
	b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾		
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Kp/05\$		
	c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$1)		
	c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾		
	c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾		
	c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$ ¹⁾		
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)	Rp/US\$1)		
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾		
	d.3. SKPLB	Rp/US\$ ¹⁾		
	d.4. SKPPKP	Rp/US\$1)		
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)	Rp/US\$1)		
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-	⊦d.5)	Rp/US\$ ¹⁾	
7	. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	
8	, Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp/US\$1)	
9	. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ¹⁾	
	Terbilang :			
10). Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	berdasarkan Rp/US\$1		
	Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN	PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN			
PAJAK PENGHASILAN				
Nomor	:			
Tahun Pajak	:			
Tanggal Penerbitan	:			
Tanggal Jatuh Tempo	·			

Nama Wajib Pajak NPWP

		JUMI	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT				
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)			
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto						
2	Harga Pokok Penjualan						
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)						
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha						
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)						
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya						
	a. Penghasilan dari luar usaha						
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebasc. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan						
	d. Lain-lain						
	e. Jumlah (a+b+c+d) Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto						
	Penyesualan fiskal:						
	a. Penyesuaian fiskal positif						
	b. Penyesuaian fiskal negatif						
	c. Jumlah (a-b)						
9	Penghasilan neto luar negeri						
	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾						
	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib						
	Kompensasi kerugian						
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)						
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)						
15	PPh terutang (tarif x 14)						
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu						
17	Jumlah PPh terutang (15+16)						
18	Kredit Pajak:						
	a. PPh ditanggung pemerintah						
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:						
	b.1. PPh Pasal 21						
	b.2. PPh Pasal 22						
	b.3. PPh Pasal 23						
	b.4. PPh Pasal 24						
	b.5. Lain–lain						
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)						
	c. Dibayar sendiri:						
	c.1. PPh Pasal 22						
	c.2. PPh Pasal 25						
	c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar)						
H	c.5. Lain-lain						
H	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)						
	d. Diperhitungkan:						
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)						
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)						
ll	d.3. SKPLB						
	d.4. SKPPKP						
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)						
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)						
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)						
20	Sanksi administrasi:						
	a, Bunga Pasal	1					
	b. Kenaikan Pasal						
\square	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)						
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			<u> </u>			

¹⁾ Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1 Pongisian Data/Identitas

 	119101111111111111111111111111111111111										
: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.		tan.									
-	Nomor	:	Diisi	dengan	nomor	ketetapan	(oleh	sistem)	sesuai	peraturan	perundang-

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

 Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tanggal Jatuh Tempo
 Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib PajakNPWPCukup jelas.Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak
- Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Penghasilan Neto/berdasarkan : Dilsl sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKBT. Norma(Jabatan)
 - 2 Penghasilan Kena Pajak
 3 PPh terutang
 5 Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKBT.
 5 Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKBT.
 - 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKBT. yang telah diperhitungkan tahun lalu
 - 5 Jumlah PPh terutang
 6 Kredit Pajak
 Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKBT.
 2 Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKBT.
 - 7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKBT. 8 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20.c Lampiran SKPKBT.
 - Sanksi administrasi dapat berupa: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
 - 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKBT. Terbilang: : Cukup jelas.
 - 10 Jumlah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT disetului berdasarkan Pembahasan Akhir PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan.

 Dalam hal jumlah Rupiah/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......)".
 - Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......)".

 Terbilang: : Cukup jelas.



SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN Nomor Tanggal Penerbitan Tahun Pajak I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan : Nama Wajib Pajak **NPWP** II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan Neto (Rugi) Rp/US\$1) 2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US\$1) 3. PPh terutang Rp/US\$1) 4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US\$1) Rp/US\$1) 5. Jumlah PPh terutang (3+4) 6. Kredit Pajak: Rp/US\$1) a. PPh ditanggung pemerintah b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain: b.1. PPh Pasal 21 Rp/US\$1) b.2. PPh Pasal 22 Rp/US\$1> Rp/US\$1) b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 Rp/US\$1) Rp/US\$1) b.5. Lain-lain Rp/US\$1) b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Dibayar sendiri: Rp/US\$1) c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 Rp/US\$1) c.3. PPh Pasal 29 Rp/US\$1) c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US\$1) Rp/US\$1) c.5. Lain-lain c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) Rp/US\$1> d. Diperhitungkan: d.1. SKPPKP Rp/US\$1) e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6.+c.6.-d.1.) Rp/US\$1)

Kepada

a.n. Direktur Jenderai Pajak Kepala Kantor,

Rp/US\$1)

NIHIL

1) Coret yang tidak perlu

7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e.)

F.4.1.23.

LAMPIRAN SKPN

SI	IRAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
	PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:	
Tahun Pajak		
Tanggal Penerbitan	:	

Nama Wajib Pajak : NPWP :

		JUMLAH	RUPIAH/US\$ ¹⁾ M	ENURUT
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan	1 1		
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1 1		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	1		
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	1		
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
- 1	b.1. PPh Pasal 21		1	
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
- 1	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
- 1	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain		l	
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
_	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1.)			
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.e.)		NIHIL	

¹⁾ Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) **PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-2

: untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-3

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-4

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Panaisian	Data/Identitas	2

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-- Nomor

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan

dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka

ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas. : Cukup jelas. - NPWP

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Kepada

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta a.n.Direktur Jenderal Pajak

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan. Kepala Kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak a. Lampiran SKPN Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak b. SKPN

Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH

RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ * Baris/No.Urut pada SKPN MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPN. (Jabatan)/ (Rugi)

2 Penghasilan Kena Pajak Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPN.

Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPN. 3 PPh terutang

4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPN. 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

5 Jumlah PPh terutang Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPN.

: Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPN. 6 Kredit Pajak

7 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPN.



SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN						
Nomor : Tanggal Penerbitan :						
Tahun Paja	ak :					
I. Telah dil	akukan penelitian/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak R	Penghasilan:				
	ajib Pajak :					
NPWP	:					
II. Dari pen	elitian/pemeriksaan ¹⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Pe	nghasilan yang lebih bayar adalah :	sebagai berikut:			
 Pen Pen Pen PPh 	ghasilan Neto (Rugi) ghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) ghasilan Kena Pajak terutang gembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahu		Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾			
6. Jum	lah PPh terutang (4+5)		Rp/US\$ ¹⁾			
a.	lit Pajak: PPh ditanggung pemerintah Dipotong/Dipungut oleh plhak lain:	Rp/US\$ ¹⁾				
	b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾				
	b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾				
	b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾				
	b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾				
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾				
	Dibayar sendiri:	,				
	c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$1)				
	c.2, PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾				
	c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$1)				
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$1)				
	c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾	_a			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$1)				
d.	Diperhitungkan:					
	d.1. SKPLB	Rp/US\$ ¹⁾				
	d.2. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾	_			
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)	Rp/US\$ ¹⁾				
e.	PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)					
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp/US\$ ¹⁾				
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp/US\$ ¹⁾				
	e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp/US\$ ¹⁾	_			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)	Rp/US\$1)				
f.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4))		Rp/US\$ ¹⁾			
8. Jum	ah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6)		Rp/US\$ ¹⁾			
	Terbilang:					

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

F.4.1.23.

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tahun Pajak : Tanggal Penerbitan :

Nama Wajib Pajak : NPWP :

		JUMLA	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT				
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)			
	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto						
- 1	Harga Pokok Penjualan						
	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)						
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha						
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)						
	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya						
	a. Penghasilan dari luar usaha						
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas						
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan						
	d. Lain-lain						
	e. Jumlah (a+b+c+d)						
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto						
8	Penyesuaian fiskal						
	a. Penyesuaian Fiskal Positif						
	b. Penyesuaian Fiskai Negatif						
	c. Jumlah (a-b)						
9	Penghasilan Neto Luar Negeri						
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾						
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib						
12	Kompensasi kerugian						
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)						
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)						
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)						
16	PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL						
17	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun						
	lalu						
18	Jumlah PPh terutang (16+17)						
19	Kredit Pajak:						
	a. PPh ditanggung pemerintah						
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:						
	b.1. PPh Pasal 21						
	b.2. PPh Pasal 22						
	b.3. PPh Pasal 23						
	b.4. PPh Pasal 24						
- 1	b.5. Lain-lain						
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)						
- 1	c. Dibayar sendiri:						
- 1	c.1. PPh Pasal 22						
- 1	c.2. PPh Pasal 25						
	c.3. PPh Pasal 29						
	c.4. STP (pokok kurang bayar)						
- 1	c.5. Lain-lain						
- 1	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)						
	d. Diperhitungkan:						
	d.1. SKPLB						
	d.2. SKPPKP						
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)						
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)						
l'	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain						
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri						
	e.3. Telah dipotong/dipungut						
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3) f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)						
	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)						

¹⁾ Coret yang tidak perlu

PETIINJIIK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 untuk Seksi Pelayanan;
- : untuk Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-4
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pengisian	Data/Identitas
----	-----------	----------------

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

; Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang- Nomor undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

; Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). - Tanggal Penerbitan

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

; Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak NPWP

memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau Kepada

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta a.n.Direktur Jenderal Paiak

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan. Kepala Kantor.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan a. Lampiran SKPLB

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$

MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$

MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut: Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPLB.

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan)/ (Rugi)

PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

2 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang : Dilsi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPLB. Dilsi dalam hal ketetapan yang

akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Neto (Rugi)" & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak" pada formulir

SKPLB tidak perlu diisi.

3 Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPLB.

5 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPLB. yang telah diperhitungkan tahun lalu

6 Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPLB.

7 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 19.f Lampiran SKPLB.

8 Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPLB. tidak terutang

- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- 1	KOD	E N	ATC

				GHITUNGAN NGHASILAN		
Untu	k Wajib Pajak :	1 ORANG PRIBADI		2 BADAN		
Untui	k Jenis Ketetapan/ :	1 STP		2 SKPKB		3 SKPKBT
Kepu	tusan	4 SKPLB		5 SKPN		6 SKPPKP
Dasa	r Penerbitan Ketetapan/ :			2 Pemeriksaan		3 Pemeriksaan Ulang
•	tusan	4 Pemeriksaan Bukti Permulaa				
	r Hukum Ketetapan/ :		2 Pasal 13A	3 Pasal 14	4 Pasal 15 ayat (1)	5 Pasal 15 ayat (3) 10 Pasal 17B
Kepu	tusan	6 Pasal 15 ayat (4) 11 Pasal 17C	7 Pasai 17 ayat (1) 12 Pasai 17D	8 Pasal 17 ayat (2)	9 Pasal 17A	LIU Pasai 176
_				n Penellilas (- Nomor :	
	Pajak : n Pajak :	s.d.	Pemer	in Penelitian/ iksaan/Pemeriksaan	- Nomor : - Tanggal :	
	n Buku :	s.d.		Pemeriksaan Bukper ¹⁾		
Perm	ohonan (LB) - Nomor :		Dasar	Penetapan Pajak Terutang ²⁾	: 1	Norma 2 Pembukuan Jabatan
Tang	- Tanggal : gal SPT Disampalkan :				ر ع	Javatan
_	a Wajib Pajak :		Cara V	VP Menghitung Penghasilan Neto ³⁾	: 1	Norma 2 Pembukuan
NPW	P :			ukuan Dalam Mata Uang ⁴⁾	: 1	Rp 2 US\$
Alam Kode			•	usan Izin Pembukuan gunakan US\$ ⁴⁾	- Nomor : - Tanggal :	
	rjaan/Usaha :			,		
KLU	(5 digit) :					
		A I D A T A B I			JUMLAH RUPIAH/US\$1) MENU	
		URAIAN		.WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran	Usaha/Bruto				
	Harga Pokok Penjualan					
	Penghasilan Bruto atau Laba bruto Pengurang Penghasilan Bruto atau					
-	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3					
2 1	Penghasilan Neto Dalam Negeri La	alnnya:				
	a. Penghasilan dari luar usahab. Penghasilan jasa/ pekerjaan b	pehas				
	c. Penghasilan sehubungan deng					
	d. Lain-lain				ļ	
	e. Jumlah (a+b+c+d) Fasilitas penanaman modal berupi	a pengurangan Penghasilan Neto				
$\overline{}$	Penyesuaian Fiskai					
	a. Penyesuaian Fiskai Positif					
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif c. Jumiah (a-b)					
$\overline{}$	Penghasilan Neto Luar Negeri					
		7+8,c+9)/berdasarkan Norma (Jaba	atan) ¹⁾			
	Zakat/sumbangan keagamaan ya: Kompensasi kerugian	ng bersifat wajib			 	
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PT	KP)				
		ek terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2)	KUP)			
	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-1 PPh terutang ((tarif X 15) atau NI					
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang	telah diperhitungkan tahun lalu				
	Jumiah PPh terutang (16+17)					
	Kredit Pajak: a. PPh ditanggung Pemerintah					
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak	lain:				
	b.1. PPh Pasal 21					
	b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23					
	b.4. PPh Pasal 24					
	b.5. Lain lain	ALL PL				
-	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b c. Dibayar sendiri:	0.4+0.5)				
	c.1. PPh Pasal 22					
	c.2. PPh Pasal 25					
	c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang baya	ne'l				-
ŀ	c.4. STP (poxok kurang baya c.5. Lain lain	")				
1	- 6 Jumple to 1 to 2 to 2 to 2	410 E)				

F.4.1.77.

		JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT					
	URAIAN		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾		
d. Diperhitungkan:							
	d.1. SKPKB (po	kok kurang bayar)					
ď		kok kurang bayar)					
ď	d.3. SKPLB						
1	d.4. SKPPKP						
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)				,		
7	e. PPh yang seharusny	a tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):					
- 17	e.1. Dibayar denga						
1	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri						
IJ	e.3. Telah dipotong/dipungut						
- 1	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)						
		dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6+d.5) atau e.4)					
		a. Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)					
0	Pajak yang:	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)					
- 17		c. Nihii (18=19.f)					
1	Sanksi Administrasi:		及(E2-0) 西南南南南南南				
- 11	a. STP						
- /	a.1. Denda Pasal 7	KUP					
- 1	a.2. Bunga Pasal 8	(2) KUP	APPLICATION TO THE REAL PROPERTY.				
- /	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		BEAR OF THE PARTY				
J	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		MODULE PROPERTY.				
- /	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				
J	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP		THE PARTY OF THE P				
1	a.7. Bunga Pasal 19		WHEN PRODUCED IN THE PERSON				
- /	b. SKPKB		Subject to the second				
	b.1. Bunga Pasal 1:	3 (2) KUP	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
- 1	b.2. Kenaikan Pasa		THE SCHOOL OF STREET				
- 1	b.3. Bunga Pasal 1						
J	b.4. Kenaikan Pasa		THE RESERVE OF THE RE				
J	b.5. Kenaikan Pasa	I 17C (5) KUP					
- 7	b.6. Kenaikan Pasa						
- /	c. SKPKBT						
J	c.1. Kenaikan Pasa	I 15 (2) KUP	ARTISTICA NOTE TO SECURE				
	c.2. Bunga Pasal 1		The second second				
		nistrasi (a atau b atau c)					
7		a. Masih harus dibayar (20.a+21.d)					
2	Jumlah PPh yang:	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)					
		c. Nihii (20.c)					

DIHITUNG	DITELITI
	I ·

¹⁾ Coret yang tidak perlu
2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampal baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampal baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
5) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP).

Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.

- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
- 3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua): - lembar ke-1 dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;

B. F

		embar ke-2		untuk pembuat Nota Penghitungan.
		uran kertas		
	Dic	etak (print-out) dalam kertas folio ukuran	8.	5″ x 13″
et	uni	uk Pengisian		
		ngisian Data/Identitas		
	-			Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
	_	Untuk Wajib Pajak		Diberi tanda " X " (silang) pada
	-	Official Vvajio Fajak	•	yang akan diterbitkan ketetapan.
	_	Kode Nota		Dilsi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
		TODO TYOU	•	undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
	_	Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
				ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.
	_	Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada [] (kotak) yang sesuai dengan dasar
				diterbitkannya ketetapan/keputusan.
	-	Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
				diterbitkannya ketetapan/keputusan.
	-	Masa Pajak	:	Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk
		-		Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan
				adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum
				butir 2).
	-	Tahun Pajak	Ċ	Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun
				Pajak tetap diisi.
	-	Tahun Buku	:	Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan
				angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang
				sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib
				Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya
				Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
	-	Permohonan (LB) - Nomor		Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
				pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
		Permohonan (LB) - Tanggal	:	Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
				pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib
•	-	Tanggal SPT Disampaikan		Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
	-	Dasar Penetapan Pajak Terutang	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
		Lan Danelitian/		penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
	•	Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan	:	Coret yang tidak perlu.
		Ulang/Pemeriksaan Bukper		
				Outron tales
		- Nomor - Tanggal		Cukup jelas. Cukup jelas.
		Nama Wajib Pajak		Cukup jelas.
		NPWP		Cukup jelas.
		Pekerjaan/Usaha		Cukup jelas.
		KLU (5 digit)		Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan
		, ,		perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan
				Usaha Wajib Pajak.
-		Alamat	:	Cukup jelas.
-		Kode Pos		Cukup jelas.
-		Cara WP Menghitung Penghasilan Neto		Diberi tanda " X " (silang) pada [
				penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
-		Pembukuan Dalam Mata Uang	ŝ	Diberi tanda " X " (silang) pada
				yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.

Keputusan Izin Menggunakan US\$

Pembukuan : Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika

- Nomor

: Cukup jelas. : Cukup jelas.

- Tanggal

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom Jurniah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK

: Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan

SPT.

FISKUS

: Diisi Rupiah/US\$ menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper.

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP: atau

b, Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

: Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.

2 Harga Pokok Penjualan

: Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto

: Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak

4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha

: Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

5 Penghasilan neto dalam negeri

; Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan persentase Norma Penghitungan.

6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

a. Penghasilan dari luar usaha

: Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian

b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

: Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.

c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

: Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

d. Lain-lain e. Jumlah

Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c. Cukup jelas.

7 Fasilitas penanaman modal berupa : pengurangan penghasilan neto

Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

8 Penyesuaian Fiskal

: Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.

9 Penghasilan neto luar negeri

Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.

10 Jumlah penghasilan neto/ berdasarkan Norma (Jabatan)

: Cukup jelas.

11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

: Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

	Kompensasi kerugian Penghasilan Tidak Kena Pajak	 Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi. Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak orang pribadi
		yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan Kena Pajak" tidak perlu diisi.
15	Penghasilan Kena Pajak	: Cukup jelas.
	PPh terutang	Cukup jelas.
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	: Cukup jelas.
	Jumlah PPh terutang (16+17)	: Cukup jelas.
19	Kredit pajak:	: Cukup jelas.
	a. PPh Ditanggung Pemerintahb. Dipotong/dipungut pihak lain	: Cukup jelas.
	c. Dibayar sendiri	: Cukup jelas.
	d. diperhitungkan	: Cukup jelas.
		: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang
	(Pasal 17 ayat (2) KUP)	seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	: Cukup jelas.
	Pajak yang:	: Berikan tanda " X " (silang) pada [(kotak) a atau b atau c yang sesuai
	a. Tidak/Kurang dibayarb. Lebih dibayar / seharusnya tidak	: Cukup jelas.
	terutang	
	c. Nihil Sanksi administrasi	Cukup jelas. - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
21	Sanksi aunimisuasi	 Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
	a. STP	: Cukup jelas.
	b. SKPKB	: Cukup jelas.
	c. SKPKBT Jumlah PPh yang:	: Cukup jelas. : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
	a. Masih harus dibayar	: Cukup jelas.
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak	: Cukup jelas.
	terutang	
	c. Nihil	Cukup jelas.
	- Terbilang:	Dilsi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS"
C. Kolom	Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokum	en
- Dihi	_	 Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Dite	liti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



				***************************************		********						
	SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL ¹⁾											
N	omoi	r		:	Tang	ıgal Per	nerbitan		:			
Masa/Tahun Pajak Tanggal Jatuh Tempo :												
I.			dilakukan pene silan Pasal	litian/pemeriksaan/pemeriksaan ul ¹⁾ :	ang/pemerik	saan	bukper ²⁾	atas p	elaksana	aan kewa	ajiban Pa	njak
	Nan	na W	Vajib Pajak	:								
	NPV	/P		:								
п.			enelitian/pemeril sebagai berikut:	ksaan/pemeriksaan ulang/pemeriks	aan bukper ²⁾) terse	but di ata	as, juml	ah yang	, masih h	arus diba	yar
	1.	Paja	ak yang harus d	ibayar				R	p			
	2.	Tela	ah dibayar					R	p			
	3.	Kur	ang dibayar (1-	2)				R	р			
	4.	San	nksi Administrasi	i:								
		a.	Denda Pasal 7	KUP	Rp							
			keterlambatan (SPT) Masa PPI	Penyampaian Surat Pemberitahuan h Pasal $^{1)}$								
		b.	Bunga Pasal 8	(2a) KUP	Rp							
				an SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ yang n utang pajak menjadi lebih besar								
		c.	Bunga Pasal 9	(2a) KUP	Rp							
			dilakukan setel	an atau penyetoran pajak yang lah tanggal jatuh tempo pembayarar In pajak yang terutang untuk suatu I Pajak	n							
		d.	Bunga Pasal 14	1 (3) KUP	Rp							
			atas kekuranga tulis dan/atau s	an pembayaran pajak akibat salah salah hitung								
		e.	Jumlah sanksi	administrasi (a+b+c+d)				R	р			
	5.	Jum	nlah yang masih	harus dibayar (3+4.e)				R	P			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor/

Kepala Seksi,³⁾

- 1) Diisi sesual dengan jenis pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SUI	RAT TAGIHAN PAJAK	_
PAJAK P	PENGHASILAN PASAL ¹⁾	
Nomor	:	_
Masa/Tahun Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	2	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Nama Wajib Pajak : NPWP :

		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS		
1	Pajak yang harus dibayar				
2	Telah dibayar				
3	3 Kurang dibayar (1-2)				
4	Sanksi Administrasi:				
	a. Denda Pasal 7 KUP	描述 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	公共 国 中国			
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)				
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)				

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

F.5.1.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal

: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. a. Tidak Final

: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, b. PPh Final

PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1

: untuk Seksi Penagihan; - lembar ke-2

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3

: untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-5

Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas	
*	: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan. PAJAK PENGHASILAN PASAL

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-Nomor undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan - Masa/Tahun Pajak tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh Tanggal Penerbitan sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka

ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam Tanggal Jatuh Tempo hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April

2017.

: Cukup jelas. Nama Wajib Pajak **NPWP** Cukup ielas.

Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan Kepada atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan а.п. Direktur Jenderal Pajak STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat Kepala Kantor/ yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

Kepala Seksi

a. Lampiran STP Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak b. STP Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

FISKUS".

* Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut: Baris/No.Urut pada STP

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok 1 Pajak yang harus dibayar pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

2 Telah dibayar

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. 4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. 5 Jumlah yang masih harus dibayar

Cukup jelas. Terbilang:



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor :	Tanggal Penerbitan	:	
Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Jatuh Tempo	:	
Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaar Nama Wajib Pajak :	n kewajiban Pajak Penghasilan	1);	
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut di atas, jumlah yan	g masih harus dibayar adalah sebag.	ai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp	
2. PPh 1) yang terutang		Rp	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp		
b. Setoran masa	Rp		
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp		
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp		
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp		
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp		
g. Lain-lain	Rp		
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp		
 jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h) 		Rp	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)		Rp	
5. Sanksl administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)		Rp	
Terbilang :		•••••	
 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Has Pemeriksaan³⁾ 	Rp		
Terbilang ³⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³).

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Baris ini tidak tercetak dalam hai SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETA	PAN PAJAK KURANG BAYAR		
PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor	:		
Masa/Tahun Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		

Nama Wajib pajak

NPWP

		JUM	LAH RUPIAH MENUR	UT
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar			
	g. Lain-lain			
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)			

- Dilsi sesuai dengan jenis pajak .
 Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.
 Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan:

: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh b. PPh Final

Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang

Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelavanan: - lembar ke-4

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-5

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Pe

1.

etu	njuk Pengisian		
. F	Pengisian Data/Identitas		
-			Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
-	PAJAK PENGHASILAN		Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
-	Nomor	:	Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
-	Masa/Tahun Pajak	:	Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.
-	Tanggal Penerbitan	:	Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
-	Tanggal Jatuh Tempo	•	Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
_	Nama Wajib Pajak	1	Cukup jelas
_	NPWP	:	Cukup jelas
-	Kepada	:	Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
-	a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,	:	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
2 F	Pengisian Jumlah RUPIAH		
а	a. Lampiran SKPKB	:	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
b	o. SKPKB	:	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan
	* Baris/No.Urut pada SKPKB		pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB.
	2 PPh yang terutang	:	Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
	3 Kredit Palak	:	Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar 5 Sanksi Administrasi

: Diisi sesual dengan baris 4 Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.

Sanksi administrasi dapat berupa:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP

: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar

- Terbilang:

: Cukup ielas.

7 Jumlah kurang bayar yang disetujul : berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut:

Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A.

Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".

Cukup jelas - Terbilang:



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN¹⁾ Tanggal Penerbitan : Nomor Tanggal Jatuh Tempo Masa/Tahun Pajak Nama Wajib Pajak NPWP II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rρ Rp 2. PPh1) yang terutang 3. Kredit Pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp b. Setoran masa Rp Rp c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak Rp Rp e. Lain-lain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak Rp g. Diperhitungkan: q.1. SKPKB (pokok kurang bayar) Rp g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) Rp g.3. SKPLB Rp g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3) h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d-f+g.4) Ro 4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h) 5. Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal Kenalkan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c) Rn Terbilang: 7. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Rp

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Terbliang:

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

2) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN F	PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN			
PAJAK PENGHASILAN ¹⁾				
Nomor	:			
Masa/Tahun Pajak	:			
Tanggal Penerbitan	:			
Tanggal Jatuh Tempo	:			

Nama Wajib pajak NPWP

		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh1) yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Diperhitungkan:			
	g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	g.3. SKPLB			
	g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)			
	h. Jumiah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f+g.4)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar: (4+5.c)			

- Diisi sesuai dengan jenis pajak
 Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Penghasilan

a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 ; untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pengisian	Data/Identitas	
----	-----------	----------------	--

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PENGHASILAN PASAL ; Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

: Dilsi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas.

- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

b. SKPKBT

Tanggal Jatuh Tempo

a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan

..... (Formulir F.4.1.77.).

Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKBT.

Pengenaan Pajak

2 PPh Pasal yang terutang
 3 Kredit Pajak
 Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
 2 Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.

5 Sanksi Administrasi ; Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.

Sanksi administrasi dapat berupa: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

b. Bunga Pasal 15 (4) KUP

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT. : Cukup jelas.

7 Jumlah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"dengan perincian sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih

Bayar ditulis dalam tanda " (......)".

- Terbilang: ; Cukup jelas.



SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PAJAK PENGHASILAN ¹⁾							
Nomor :	Tanggal Penerbitan	:					
Masa/Tahun Pajak :							
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Peng	ghasilan ¹⁾ :						
Nama Wajib Pajak :							
NPWP :							
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:							
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp					
2. PPh ¹⁾ yang terutang		Rp					
3. Kredit Pajak:							
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp						
b. Setoran masa	Rp						
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp						
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp						
e. La l n-lain	Rp						
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp						
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)		Rp					
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)		Rp	NIHIL				

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

F.4.1.23.

LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN ¹⁾					
Masa/Tahun Pajak	:				
Tanggal Penerbitan	:				

Nama Wajib Pajak

NPWP

		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak				
2	PPh ¹⁾ yang terutang				
3	Kredit pajak:				
	a. PPh Ditanggung Pemerintah				
	b. Setoran masa				
	c. STP (pokok kurang bayar)				
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak				
	e. Lain-lain				
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak				
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)				
4 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g) NIHIL					

1) Dilsi sesuai dengan jenis pajak

F.4.1.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan

: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. a. Tidak Final

: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh b. PPh Final

Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-2

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-4

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PENGHASILAN PASAL Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-Nomor

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak. : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

Masa/Tahun Pajak tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh Tanggal Penerbitan

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka

ditulis 27 Maret 2017.

: Cukup jelas. Nama Wajib Pajak **NPWP** : Cukup jelas.

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau Kepada

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta a.n.Direktur Jenderal Pajak

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan. Kepala Kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak a. Lampiran SKPN

Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". b. SKPN

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut: * Baris/No.Urut pada SKPN

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPN.

Pengenaan Pajak

2 PPh yang terutang Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN. 3 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.

4 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾							
Nomor : Tanggal Penerbitan : Masa/Tahun Pajak :							
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan	1):						
Nama Wajib Pajak :							
NPWP :							
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang le	bih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:						
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp						
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp						
3. PPh ¹⁾ yang terutang	Rp						
4. Kredit Pajak:							
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp						
b. Setoran masa	Rp						
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp						
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp						
e. Lain-lain	Rp						
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp						
g. Diperhitungkan:							
g.1. SKPLB	Rp						
h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):							
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp						
h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp						
h.3. Telah dipotong/dipungut	Rp						
h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)	Rp _						
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))	Rp						
5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)	5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)						
Terbliang:							

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- Diisi sesual dengan jenis pajak
 Coret yang tidak perlu

F.4.1.23

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR						
PAJAK PENGHASILAN 1)						
Nomor	:					
Masa/Tahun Pajak	:					
Tanggal Penerbitan	:					

Nama Wajib Pajak NPWP

		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak				
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)				
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)				
4	Kredit pajak:				
	a. PPh Ditanggung Pemerintah				
	b. Setoran masa				
	c. STP (pokok kurang bayar)				
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak				
	e. Lain-lain				
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak				
	g. Diperhitungkan:				
	g.1. SKPLB				
	h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
	h.3. Telah dipotong/dipungut				
	h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)				
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))				
5	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i3)				

¹⁾ Diisi sesual dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.

: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh b. PPh Final

Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-4

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

.....: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan. PAJAK PENGHASILAN PASAL

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-Nomor

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

; Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun Masa/Tahun Pajak

pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal

diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

; Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Tanggal Penerbitan

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

: Cukup jelas. Nama Wajib Pajak NPWP : Cukup jelas.

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau Kepada

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib

Pajak yang bersangkutan.

a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

Kepala Kantor.

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan a. Lampiran SKPLB

.... (Formulir F.4.1.77.).

b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan

... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

* Dilsi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut: * Baris/No.Urut pada SKPLB

1. Penghasilan Pajak/Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPLB. Kena

Pengenaan Pajak

2. Penghasilan yang seharusnya tidak : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang

seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1

"Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB. 3. PPh Pasal yang terutang 4. Kredit Pajak Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.

5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/ : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.

seharusnya tidak terutang

- Terbilang: ; Cukup jelas.



Masa Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE	NOTA
	_

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN¹⁾ 3 Pasal 23 4 Pasal 26 1 Tidak Final : 1 Pasal 21 2 Pasal 22 2 Pasal 15 Final 3 Pasal 19 Final 4 PPh Pasal 21 Final 2 PPh Final : 1 Pasal 4 (2) Final 5 Pasal 22 Final 6 Pasal 23 Final 7 Pasal 26 Final 8 PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan : 1 STP 2 SKPKB 3 SKPKBT Untuk Jenis Ketetapan 4 SKPLB 5 SKPN : 1 Penelitlan 3 Pemeriksaan Ulang 2 Pemeriksaan Dasar Penerbitan Ketetapan 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan : 1 Pasal 13 UU KUP 3 Pasal 14 UU KUP 4 Pasal 15 ayat (1) UU KUP 2 Pasal 13A UU KUP Dasar Hukum Ketetapan 6 Pasal 17 ayat (1) UU KUP 7 Pasal 17 ayat (2) UU KUP 8 Pasal 17A UU KUP 5 Pasal 15 ayat (3) UU KUP 11 Pasal 18 UU PP 9 Pasal 17B UU KUP 10 Pasal 13 ayat (4) UU PP s.d. Tahun Pajak : s.d.

Perminonionan (LD)	- NORIOI	•	Tarion Daka		•	
, .	- Tanggal		Laporan Penelitian/	- Nomor		
	- ranggar	:	Pemeriksaan/Pemeriksaan		:	
Tanggal SPT Disam	paikan	:	Ulang/Pemeriksaan Bukper ²⁾	- Tanggal	:	

Pekerjaan/Usaha Nama Wajib Pajak :

NPWP

KLU (5 digit) Alamat

Kode Pos

*			JUMLAH RUPIAH MENURUT			
		URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾	
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar	Pengenaan Pajak:			L Lincoln	
	a. PPh Pasal 21					
	a.1. Pegawal tetap					
	a.2. Pegawai tidak tetap					
	a.3. Jumlah (a.1+a.2)					
	b. PPh Pasal 22/23/26					
	c. PPh Final ¹⁾					
2		dak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)				
	PPh1) yang terutang (tarif					
	Kredit Pajak:					
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	1				
	b. Setoran masa					
-	c. STP (pokok kurang bayar)					
	d. Kompensasi kelebihan dari	Masa Pajak				
-	e. Uang Tebusan yang telah d					
		an Harta Bersih yang telah dibayar				
	g. Lain-lain					
	h. Kompensasi kelebihan ke M	lasa Pajak				
-	i. Diperhitungkan:					
	I.1. SKPKB (pokok kura	ng bavar)				
- 1	i.2. SKPKBT (pokok kurai					
- 1	I.3. SKPLB					
	i.4. Jumlah (i.1.+i.2-i.3)					
		terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	j.1. Dibayar dengan NPWP					
	j.2. Dibayar dengan NPWP					
	1.3. Telah dipotong/dipung					
- 1	j.4. Jumlah (j.1+j.2+j.3)					
		kreditkan ((a+b+c+d+e+f+g-h+i.4) atau (j.4))				
_	t. Johnson pojek yang dapat a	a Tidak/Kurang dibayar (3-4.k)				
5	Pajak yang :	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.k-3)				
١	rajak yang .	c Nihit (3=4.k)				
6	Sanksi Administrasi :	- Inner to my	TARK INC.			
- 1	a, STP					
	a.1. Denda Pasal 7 KUP					
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP					
H	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP					
1	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KU		THE PARTY OF THE			
ŀ	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KU					
ŀ	a.6. Bunga Pasal 19 (3) KU		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT				
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾		
b.	SKPKB					
	b.1. Bunga Pasal 13 (2	2) KU	P			
	b.2. Kenalkan Pasal 13	3 (3)	KUP	(FA (A) 4 (A) 4 (A) 4 (A) 4 (A)		
	b.3. Bunga Pasal 13 (5	5) KU	P			
	b.4. Kenaikan Pasal 13	BA KL	JP .			
	b.5. Kenalkan Pasal 18 ayat (3) UU PP c. SKPKBT		AND THE PARTY OF			
c.						
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP					
	c.2. Bunga Pasal 15 (4	i) KU	P	HORIZE ELECTRIC		
d.	Jumlah sanksi administ	rasi ((a atau b atau c)	THE REAL PROPERTY.		
			Masih harus dibayar (5.a+6.d)			
7 Jur	Jumlah PPh yang :	b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)			
			Nihil (5.c)			

DIHITUNG	DITELITI

- Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 Coret yang tidak perlu
 Kolom ini tidak diisi dalam hal:

 a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
 b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

F.4.1.77.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas PPh yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas PPh:
 - : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh b. PPh Final Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa

Pajak Maret 2017.

Pekerjaan/Usaha

3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) 🛊 dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp; - lembar ke-1 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip. - lembar ke-2

: Cukup jelas.

4.

B. Pe

1.

	- lembar ke-2	. Untuk seksirunt pembuat Nota Fengintungan sebagai arsip.
	Ukuran kertas	
	Dicetak (print-out) dalam kertas fol	o ukuran 8.5" x 13"
e	tunjuk Pengisian	
	Pengisian Data/Identitas	
	***************************************	: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
	- Kode Nota	: Diisi pada [(kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
	- PAJAK PENGHASILAN	: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
	- Tidak Final/Final	: Diberi tanda " X " (silang) pada
	- Untuk Jenis Ketetapan	: Diberi tanda " X " (silang) pada
	- Dasar Penerbitan Ketetapan	: Diberi tanda " X " (silang) pada
	- Dasar Hukum Ketetapan	: Diberi tanda " X " (silang) pada [(kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
	- Masa Pajak	Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
	- Tahun Pajak	: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
		Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.
	- Tahun Buku	: Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
	- Permohonan (LB) - Nomor	: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
	- Tanggal	: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
	- Tanggal SPT Disampaikan	: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
	- Lap. Penelitian/	: Coret yang tidak perlu.
	Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper	
	- Nomor	: Cukup jelas.
	- Tanggal	: Cukup jelas.
	- Nama Wajib Pajak	: Cukup jelas.
	- NPWP	Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-- KLU (5 digit) undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Alamat : Cukup jelas. : Cukup jelas. Kode Pos 2. Pengisian tabel Nota Penghitungan Kolom Jumlah Rupiah Menurut: : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT. - WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Ruplah menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil FISKUS Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper. : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur - PEMBAHASAN AKHIR dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (DISETUJUI) Kolom ini tidak diisi dalam hal: a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A; atau b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP. **Baris/Nomor Urut** 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 " Penghasilan yang Pengenaan Pajak seharusnya tidak terutang" tidak perlu diisi. 2 Penghasilan yang Seharusnya : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Tidak Terutang PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi. : Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL 3 PPh ... yang terutang dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang. 4 Kredit Paiak: a. PPh Pasal 21 Ditanggung : Cukup jelas. : Cukup jelas. b. Setoran masa : Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka c. STP (pokok kurang bayar) ' 0 " (noi) atau " - " (strip). d. Kompensasi kelebihan dari : Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2017 dan Masa Pajak Mei 2017, maka ditulis " Januari Masa Pajak..... : Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah e. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. dibavar 🕆 Diisi dalam hal terdapat PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih oleh Wajib Pajak. yang telah dibayar 🖫 Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, e, f, h, dan i, termasuk setoran g. Lain-lain h. Kompensasi kelebihan ke : Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2017 dan Masa Pajak Juli 2017, maka ditulis "April 2017, Juli 2017". Masa Pajak Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan. i. Diperhitungkan PPh yang seharusnya tidak : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi. k. Jumlah pajak yang dapat : Cukup jelas. dikreditkan 5 Pajak yang: : Cukup ielas. a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas. b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang c. Nihil : Cukup jelas. : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; 6 Sanksi administrasi Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang penelitian/pemeriksaan. a. STP : Cukup jelas. b. SKPKB : Cukup jelas. c. SKPKBT : Cukup jelas. : Berikan tanda " X " (silang) pada [(kotak) a atau b atau c yang sesuai 7 Jumlah PPh yang: a. Masih harus dibayar : Cukup jelas. b. Lebih dibayar/seharusnya : Cukup jelas.

tidak terutang

c. Nihil : Cukup jelas.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". - Terbilang:

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

: Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan. : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan. - Dihitung - Diteliti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA						
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
No	omor	: Tanggal Pener	bitan :			
M	asa Paja	k : Tanggal Jatuh	Tempo :			
I.		dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti nbahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :	permulaan ²⁾ atas pelaksar	naan kewajiban Pajak		
	Nama NPWP	Wajib Pajak/PKP : :				
II.		enelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ t a sebagai berikut :	ersebut diatas, jumlah yang	g masih harus dibayar		
		LIDATAN	JUMLAH RUPI	AH MENURUT		
No.		URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS		
1	-	harus dibayar/ ditagih kembali				
2		dibayar				
4		g dibayar (1-2)	The second second second			
4		Administrasi :	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
	ket	nda Pasal 7 KUP terlambatan Penyampalan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak tambahan Nilai (PPN)				
- 1	b. Bu	nga Pasal 8 (2a) KUP				
		s pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih				
		nga Pasal 9 (2a) KUP				
	pei	s pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo mbayaran atau peyetoran pajak				
	ata	nga Pasal 14 (3) KUP s kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah ung				
- 1		nda Pasal 14 (4) KUP				
		pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat				
	e.2	waktu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP				
		Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesual dengan masa penerbitan faktur pajak				
		e.1+e.2+e.3				
	Per per	nga Pasal 14 (5) KUP ngusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan ngembalian Pajak Masukan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) PPN				
	g. Jur	nlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e.4+f)				
5	Jumlah	yang masih harus dibayar (3+4.g)				

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada	a.n.	Direktur Jenderal Pajak	
		Kepala Kantor/	
		Kepala Seksi	3)

- 1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjuaibelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesual dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK		
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA		
		1)
Nomor	:	
Masa Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	:	
Tanggal Jatuh Tempo	(4)	

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

		JUMLAH RUPI	AH MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)		

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan.

F.5.2.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Penagihan; - lembar ke-2

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3

untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-5

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ; Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak

Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP

dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-Nomor undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis

Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Masa Pajak tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret

2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh Tanggal Penerbitan sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan

dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

Cukup ielas. NPWP

Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan Kepada atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat

dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Coret yang tidak perlu dan/atau dilsi dengan nama seksi yang menerbitkan a.n. | Direktur Jenderal Pajak STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat Kepala kantor/ Kepala Seksi,

yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak a. Lampiran STP Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak b. STP

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut: * Baris/No.Urut pada STP

1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok

pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. 4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH Terbilang:

RUPIAH MENURUT FISKUS"

: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.

2 Telah dibayar

3 Kurang dibayar

Jumlah yang masih harus dibayar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1) Tanggal Penerbitan Nomor : Tanggal Jatuh Tempo Masa Pajak Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai I. Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : Dari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai II. JUMLAH RUPIAH MENURUT URAIAN No. PENGUSAHA KENA **FISKUS PAJAK** Dasar Pengenaan Pajak: 1 a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng¹⁾: d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan4) d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipunaut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) Penghitungan PPN Kurang Bayar: 2 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)

e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah (a+b)	
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)	
5	Sanksi administrasi:	
1	a. Bunga Pasal	
	b. Kenaikan Pasal	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)	
To	erbilang:	
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil	
	Pemeriksaan ⁶⁾	
Т	erbilang ⁶⁾ :	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan⁶⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa⁶⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2) Coret yang tidak perlu
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilsi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, disi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR		
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA		
***************************************	1)	
Nomor	:	
Masa Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

		JUL	ILAH RUPIAH MENU	RUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁶⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Keglatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)			(DISETUJUI) *
3 4 5	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak			

- Dilsi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

 Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

 Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

 Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

 Coret yang tidak perlu

 Kolom juli tidak dilisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan parandinan serual s 1)

- 2) 3) 4)
- 5) 6) Kolom ini tidak dilsi dalam hai SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1

- lembar ke-2 untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3

- lembar ke-4 untuk Seksi Pelavanan:

- lembar ke-5 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

; Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

Nomor

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Masa Pajak

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Tanggal Jatuh Tempo

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

NPWP

: Cukup jelas.

Kepada

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n. Direktur Jenderal Paiak Kepala kantor.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPKB

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPKB

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.a. Lampiran SKPKB.

yang terutang PPN

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.

yang tidak terutang PPN

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKB.

c. Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB. Daerah dari Luar Berwuiud Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Untuk Semula Tidak Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB. : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB. 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB. 4 PPN yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB. 5 Sanksi Administrasi Sanksi administrasi dapat berupa: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB. : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKB pada - Terbilang: kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" 7 Jumlah kurang bayar yang disetujui : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: Pemeriksaan. : - Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".

Cukup jelas.

- Terbilang:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

	SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR T PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DA		
		1)	
Nor	nor : Tanggal Penerbi	itan :	
Mas	sa Pajak : Tanggal Jatuh T	empo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajibal Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :	n Pajak Pertambaha	an Nilai Barang dan
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP ;		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus	dibayar adalah seb	agai berikut :
		JUMLAH RUPI	AH MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor		
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)		
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP darl Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut ¹⁾ :		
	d.1. Impor BKP		
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean		
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean	- I	
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak		
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri		
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾		
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut		
	d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.8)		
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾		
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	b.5. Lain-lain		
- 1	h 6 Jumlah (h 1+h 2+h 3+h 4+h 5)		

	c. Diperhitungkan:
	c.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
	c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
	c.3. SKPLB
	c.4. SKPPKP
	c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)
	c. Jumlah (a+b)
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)
5	Sanksi administrasi:
	a. Bunga Pasal
	b. Kenaikan Pasal
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)
Ter	bilang:
7	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan
	Akhir Hasil Pemeriksaan ⁶⁾
Ter	bilang ⁶⁾ :

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampal dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2) Coret yang tidak perlu
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN			
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
1)			
Nomor	:		
Masa Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

		MUC	ILAH RUPIAH MENU	IRUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Aktiva Tetap	I		
	Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyeranan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			
4 5	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal			

- Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut. 1)
- Coret yang tidak p[erlu

- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilsi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
 Dilsi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
 Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilsi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa. 3) 4) 5)

PETIINJIIK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas:
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1
 - untuk Seksi Penagihan; - lembar ke-2
 - untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3
 - untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4
 - untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-5

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA: Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum)

tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Masa Pajak

Nomor

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

Tanggal Jatuh Tempo

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

NPWP

Cukup jelas.

Kepada

- Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor,
- Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPKBT

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPKBT

- Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- Baris/No.Urut pada SKPKBT
- * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
- 1 Dasar Pengenaan Pajak:
 - vang terutang PPN
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa: Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT.
 - yang tidak terutang PPN
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan
- : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKBT.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT. Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Pemungut Pajak/Kegiatan oleh Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar

3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan

4 PPN yang tidak/kurang dibayar

5 Sanksi Administrasi

6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar - Terbilang:

7 Jumlah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.

; Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.

Sanksi administrasi dapat berupa:

a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

b. Bunga Pasal 15 (4) KUP

: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKBT pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".

: Cukup jelas. - Terbilang:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

...... **SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL** PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA1) Tanggal Penerbitan Nomor Masa Pajak Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP **NPWP** Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : II. JUMLAH RUPIAH MENURUT URAIAN No. PENGUSAHA KENA **FISKUS PAJAK** Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2) a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan¹⁾: d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan3) d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
 e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah (a+b)	
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)	NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- Diisi Jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL			
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
1)			
Nomor	:		
Masa Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	100		

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

		MUC	LAH RUPIAH MENI	JRUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor			
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2)			
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)			
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ :			
	d.1. Impor BKP			
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean			
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	d.5. Keglatan Membangun Sendiri			
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan			
	Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
-	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri			
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)			
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾			
	b,3. STP (pokok kurang bayar)			
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Diperhitungkan:			
	c.1, SKPPKP			
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)			
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			

		- 12		
	3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	- 1	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
		b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)		
		c. Jumlah (a+b)		
1	4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)	NIHIL	

- Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk 1)
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa 2)
- Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

 Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa. 3) 4)

F.4.2.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-2

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-4

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pengisian	Data/Identitas
----	-----------	-----------------------

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisl jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pernungutan Pajak oleh Pernungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP

(PPN seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-- Nomor

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Masa Pajak

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

NPWP

: Cukup jelas.

Kepada

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPN

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

h SKPN

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPN

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

yang terutang PPN

Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.

yang tidak terutang PPN

Jumlah seluruh penyerahan

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN. Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan

Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan

Penghitungan PPN Kurang Bayar
 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan
 Jumlah PPN yang masih harus dibayar

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.

: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN J	ASA	
No	mor : Tanggal Penerbita	n :	
Ma	sa Pajak :		
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Pajak/Pengusaha Kena Pajak:	Nilai Barang dan	Jasa dari Wajib
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/sehari berikut :	usnya tidak terutan	g adalah sebagai
		JUMLAH RUPI	AH MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor		
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾		
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)		
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah		
	Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap		
	yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ :		
	d.1. Impor BKP		
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean		
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean		
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak		
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri		
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾		
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)		
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar:		
- 1	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri		
- 1	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)		
	b. Dikurangi:		
- 1	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾		
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	b.5. Lain-lain		
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan:
	c.1. SKPLB
	c.2. SKPPKP
1	c.3. Jumlah (c.1+c.2)
	d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
	d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri
	d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain
	d.3. Telah dipungut
	d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))
	f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)
	c. Jumlah (a+b)
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f3.c.)
	Terbilang:

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA					
Nomor	•				
Tanggal Penerbitan	:				
Masa Pajak	:				

Nama Wajib Pajak/PKP

		JUML	AH RUPIAH MENL	IRUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ i. d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan BKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)			(DISCIOSOL)
2	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP c.3. Jumiah (c.1+c.2) d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.3. Telah dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4)) f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terhutang (e-a)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f3.c.)			

- 1) Dilsi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
 Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilal yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan:
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA: Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP

dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

Nomor Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Masa Paiak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan

tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27

Maret 2017. Nama Wajib Pajak

NPWP : Cukup jelas (Diisl dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak

: Cukup ielas

memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)

Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Kepada

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n. Direktur Jenderal Paiak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta Kepala kantor,

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH

MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB. yang terutang PPN

Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB. yang tidak terutang PPN

Jumlah seluruh penyerahan

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.

Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Tujuan Semula Diperjualbelikan

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.

ayat (2) KUP)

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1.a s.d. 1.d tidak

perlu diisi.

2 Penghitungan PPN Lebih Bayar:

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampisan SKPLB.

3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.

terutang

4 PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.

- Terbilang:

: Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 Lampiran SKPLB pada kolom

"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOD	Ę	NC	TA

		NOTA DENC	GHITUNGAN			
			MBAHAN NILA	\I		
ATAS	: 1 PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP	2 IMPOR BKP			IANFAATAN BKP TIDAK BE IR DAERAH PABEAN	RWUJUD DARI
	4 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR	5 KEGIATAN ME	MBANGUN SENDIRI		IUNGUTAN PAJAK OLEH PE	MUNGUT PAJAK
	DAERAH PABEAN					
	7 PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP				MINTAAN KEMBALI PAJAK	PERTAMBAHAN NILAI IBADI PEMEGANG PASPOR
	DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pa sebelumnya)	ajak atau Bagian Tanun Paj	ak atau Tanun Pajak 2		ir negeri	IDADI PEMEGANG PASPOR
	9 PKP YANG GAGAL BERPRODUKSI		ANG PPN-NYA TIDAK		IGGUNG JAWAB SECARA R	ENTENG
	DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN	DIPUNGUT 1)	DIBEBASKAN ATAU T	IDAK		
		511 511651				
Jenis Ketetapan/		2 SKPKB		3 SKF		
Keputusan	4 SKPLB	5 SKPN		6 SKF	PKP	
Dasar Penerbitan	Ketetapan/ : 1 Penelitian	2 Pemeriksaan	3 Pemeriksaan U	liang 4 Pen	neriksaan Bukti Permulaan	
Keputusan						
Dasar Hukum Kel	tetapan/ : 1 Pasal 13	2 Pasal 13A	3 Pasal 14	4 Pas	al 15 Ayat (1) 5	Pasal 15 Ayat (3)
Keputusan	6 Pasal 17 Ayat (1)	7 Pasal 17 Ayat (2)	8 Pasal 17 A	9 Pas	al 17B 10	Pasal 17C
	11 Pasal 17D	12 Pasal 9 (4c)	13 Pasal 17E UU k	KUP jo.		_
		UU PPN	Pasal 16E UU F			
Masa Pajak	; s,d.	. Tah	un Pajak		:	
Permohonan (LB)) - Nomor :	Tah	un Buku		:	s.d.
	- Tanggal :	Lap			omor :	
			elitian/Pemeriksaan/P ng/Pemeriksaan Bupei	44	nggal :	
Tanggal SPT Disa	empaikan :		ng/r amerikaan bapa.			
Nama Wajib Paja	k/PKP :	Pek	erjaan/Usaha		:	
NPWP	:	KIII	J (5 digit)		:	
Alamat Kode Pos	:	KLO	/ (5 digit)			
	kan atau Tidak Dipungut ²⁾					
	at Keterangan Fasilitas :					
b. Tanggal Sur	rat Keterangan Fasilitas :					
	rolehan Barang Modal :					
d. Nilai Peroleh	han Barang Modal :					
d. Nilai Peroleh e. Nilai PPN ya	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :					
d. Nilai Peroleh e. Nilai PPN ya	han Barang Modal :				TI IMI AH D) IDTAL: MENTIDI	ır
d. Nilai Peroleh e. Nilai PPN ya	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran :				JUMLAH RUPIAH MENURU	
d. Nilai Peroleh e. Nilai PPN ya	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :			WAJIB PAJAK	JUMLAH RUPIAH MENURU	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
d. Nilai Peroleh e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN enaan Pajak:			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 P	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3)			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 P a.4 P a.5 P	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3) Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut PPN PPN PPN PPN PPN PPN PPN PPN PPN PP			WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Pengg a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 p a.4 p a.5 p a.6 J	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Iumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5	PPN		WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Pengg a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 p a.4 p a.5 p a.6 J b. Atas Pe	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Iumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI	PPN		WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah	han Barang Modal : ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut : rjadinya Pelanggaran : URAIAN LIRAIAN LIRA	PPN N	ofaatan 1KD dari Luar	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 p a.4 p a.5 p a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN lumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak,	PPN N .uar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen	idirl/Penyerahan atas	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T	han Barang Modal ing Dibebaskan atau Tidak Dipungut injadinya Pelanggaran URAIAN URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemungatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabaan/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Tetan yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D	PPN N Luar Daerah Pabean/Pemar /Kegiatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut irjadinya Pelanggaran URAIAN URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 Enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) Inpor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Dan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P	PPN N Luar Daerah Pabean/Pemar /Kegiatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu	han Barang Modal ing Dibebaskan atau Tidak Dipungut injadinya Pelanggaran URAIAN URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemungatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabaan/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Tetan yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D	PPN N Luar Daerah Pabean/Pemar /Kegiatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet f. Tanggal Ter f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ii	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut irjadinya Pelanggaran URAIAN URAIAN URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabaan/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P ut/ Tanggung Jawab Secara Renteng 4):	PPN uar Daerah Pabean/Pemar Kegjatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ii d.2 P	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut irjadinya Pelanggaran URAIAN URAIAN enaan Pajak: enyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabaan/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Dan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang Put/ Tanggung Jawab Secara Renteng 4): mpor BKP	PPN uar Daerah Pabean/Pemar Kegjatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter 1 Dasar Penge a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut irjadinya Pelanggaran URAIAN PPN: Ekspor Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Urainya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Umlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 Enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Seluruh Penyerahan (a.6+b) Inpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabaan/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Dan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P ut/ Tanggung Jawab Secara Renteng 4): Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah	PPN uar Daerah Pabean/Pemar Kegjatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d	diri/Penyerahan atas perproduksi dan telah	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 p a.4 p a.5 p a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 II d.2 p d.3 p d.4 p d.5 K	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN lumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) an pengembalian Pajak deh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P ut/ Tanggung Jawab Secara Renteng ⁴⁾ : mpor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Gegiatan Membangun Sendiri	N Luar Daerah Pabean/Pemar (Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ii d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN enaan Pajak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN lumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) npor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang P ut/ Tanggung Jawab Secara Renteng 4): mpor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Gegiatan Membangun Sendiri Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan	N Luar Daerah Pabean/Pemar (Keglatan Membangun Sen ilperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN LURAIAN LU	N Luar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper igembalian Pajak Masukan	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut injadinya Pelanggaran URAIAN U	N Luar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper igembalian Pajak Masukan	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 In d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Pelanggaran URAIAN LURAIAN LU	PPN Luar Daerah Pabean/Pemar /Kegiatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper igembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T d.10 J d	han Barang Modal ing Dibebaskan atau Tidak Dipungut injadinya Pelanggaran URAIAN U	PPN Luar Daerah Pabean/Pemar /Kegiatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper igembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Im Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 II d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T d.10 Ji e. Seharus 2 Penghitunga 2	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Palak	N Luar Daerah Pabean/Pemar Kegjiatan Membangun Sen jiperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper ngembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut tu d.6 atau d.7 atau d.8 ata	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 III d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T d.10 Ji e. Seharus 2 Penghitunga a. PPN yara	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Dipunguk ang Pelanggaran URAIAN Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Iumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5 Enyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) Angor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang P ut/ Tanggung Jawab Secara Renteng Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Gegiatan Membangun Sendiri Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pen Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebask Tanggung Jawab Secara Renteng umlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 ata snya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) an PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar ng harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau	N Luar Daerah Pabean/Pemar Kegjiatan Membangun Sen jiperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper ngembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut tu d.6 atau d.7 atau d.8 ata	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 Ji b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva 1 diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T d.10 Ji e. Seharus 2 Penghitunga a. PPN yar b. Dikuran	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Palak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: anyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ang Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) anpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P at/ Tanggung Jawab Secara Renteng at/ Tanggung Jawab Secara Renteng apperahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebask anggung Jawab Secara Renteng umlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 ata snya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) an PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar ng harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau	N Luar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper ngembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut Lu d.6 atau d.7 atau d.8 ata	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolei e. Nilai Perolei e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 p a.3 p a.4 p a.5 p a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 p d.3 p d.4 p d.5 K d.6 p d.7 p d.8 p d.9 T d.10 Ju e. Seharus a. PPN yar b. Dikuran b. Dikuran	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Palak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: anyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ang Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angurahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angurahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN angurahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN seluruh Penyerahan (a.6+b) anpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L angung Jawab Secara Renteng angurahan JKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan BKP tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan BKP tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean benanfaatan BKP tidak Berwujud dari Luar Daerah benanfaatan BKP tidak Berwujud	N Luar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper ngembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut Lu d.6 atau d.7 atau d.8 ata	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR
d. Nilai Perolet e. Nilai Perolet e. Nilai PPN ya f. Tanggal Ter a. Atas Pe a.1 E a.2 P a.3 P a.4 P a.5 P a.6 J b. Atas Pe c. Jumlah d. Atas Irr Daerah Aktiva T diberika dipungu d.1 Ir d.2 P d.3 P d.4 P d.5 K d.6 P d.7 P d.8 P d.9 T d.10 J e. Seharus 2 Penghitunga a. PPN yar b. Dikuran b.1 Pi b.2 P;	han Barang Modal ang Dibebaskan atau Tidak Dipungut ang Palak: anyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: anyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ang Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut benyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN angerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPI Seluruh Penyerahan (a.6+b) anpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari L Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk D an pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang P at/ Tanggung Jawab Secara Renteng at/ Tanggung Jawab Secara Renteng apperahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan benyerahan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebask anggung Jawab Secara Renteng umlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 ata snya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) an PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar ng harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau	N Luar Daerah Pabean/Pemar //Keglatan Membangun Sen iperjualbelikan/PKP gagal b PN-nya tidak seharusnya d Pabean Semula Tidak Untuk Diper ngembalian Pajak Masukan an atau tidak dipungut Lu d.6 atau d.7 atau d.8 ata	idiri/Penyerahan atas perproduksi dan telah libebaskan atau tidak dipebaskan atau tidak	WAJIB PAJAK	T	PEMBAHASAN AKHIR

b.5 Lain-lain

			JUM	LAH RUPIAH MENU	RUT
	URAIAN	WAJIB PAJA	к	FISKUS	PEMBAHASAN AKHII (DISETUJUI) ⁷⁾
	c. Diperhitungkan:				
j	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)				
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)				
1	c.3 SKPLB				
	c.4 SKPPKP				
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)				_
J	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):		_		
	d.1 Dibayar dengan NPWP plhak lain				
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	d.3 Telah dipungut				
1	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)		_		
-	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))				
	f.1 Kurang Bayar (a-e) f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang		_	_	
-	yang:	(e-a)			
4	f.3 Nihii (a=e)				_
	Kelebihan Pajak yang sudah:		_		
Į	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya				
1	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)				
	c. Jumlah (a+b)		-		4
	a. Tidak/Kurang dibayar (2,f,1+3.c atau 3.				
۱	PPN yang: b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	g (2.f.2-3.c)	_		
	c. Nihii ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))				
5	Sanksi administrasi :		200		
	a. STP:		200		
ļ	a.1. Denda Pasal 7 KUP		200 0 000		
	a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	A TOTAL CONTRACTOR	100 000		
	a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		1		
	a.4. Bunga Pasal 14 (3)KUP	With the second			
	a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP				
	a.6. Bunga Pasal 14 (5) KUP				
	b. SKPKB:				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	b.4. Kenalkan Pasal 13A KUP	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	b.5. Kenalkan Pasal 17C (5) KUP	Fig. 1. Chin	2000		
1	b.6. Kenalkan Pasal 17D (5) KUP				
	b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP Jo. Pasal 9 (4f) PPN				
	c. SKPKBT:				
	c.1. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP	0.5 0.305,05			
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP	日 日 日 日 日 日			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		Sell III		
	a Masih harus dibayar (4.a+5.d)				
;	Jumlah PPN yang: b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(4.b)			
-1	c Nihii (4.c)				

DIHITUNG	DITELITI
I .	
I 1	

⁷⁾ Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

	PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA					
		NOTA PENGHITUNGAN PAJAP		WINDHING BUILD STUCK		
A.		Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai B pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan buk menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ket	ti pe tetap Baya	ang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitia permulaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang aka apan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusa merbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :		
	3	Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, Kecuali untuk p	emu un F di pe emb n ata pan, pene	ula Tidak Untuk Diperjualbelikan Pajak 2006 dan sebelumnya) megang paspor luar negeri palian Pajak Masukan au tidak dipungut satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa prbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanks		
administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta n dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitu yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak M 2017,						
		Dibuat dalam rangkap 2 (dua): - lembar ke-1 - lembar ke-2 Ukuran kertas		dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP; untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.		
		Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"				
В.		runjuk Pengisian Pengisian Data/Identitas				
	١.		:	Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota		
		- Kode Nota	:	Penghitungan. Disi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.		
		- Atas		Diberi tanda " X " (silang) pada		
		- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan	:	 Diberi tanda " X " (silang) pada		
		- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan		Diberi tanda " X " (silang) pada		
		- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan		Diberi tanda " X " (silang) pada L (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.		
		- Masa Pajak	:	Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).		
		- Tahun Pajak	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.		
		- Tahun Buku	:	Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.		
		- Permohonan (LB) - Nomor	:	Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.		
		Permohonan (LB) - Tanggal	:	Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.		
		 Tanggal SPT Disampaikan Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper 	:	Cukup jelas. Coret yang tidak perlu.		
		- Nomor - Tanggal		Cukup jelas. Cukup jelas.		
		Nama Wajib Pajak/PKPNPWP	:	Cukup jelas. Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)		

: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Cukup jelas.

Alamat

Kode Pos Pekerjaan/Usaha KLU (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas
- Tanggal Surat Keterangan Fasilitas
- Tanggal Perolehan Barang Modal
- d. Nilai Perolehan Barang Modal
- Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran
- 2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK
- FISKUS
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

- : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- : Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Cukup ielas.
- Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
- : Cukup jelas.
- : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A.

Barls/Nomor Urut

- 1 Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 - a.1. Ekspor
 - sendiri
 - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh : a.3 Pemungut PPN
 - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.4
 - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan a.5 PPN
 - Jumlah (a.1+ a.2+a. 3+a.4+a.5) a.6
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak : terutang PPN:
 - c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)
 - d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud : dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang dan telah diberikan berproduksi gagal pengemballian Pajak Masukan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:

- : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - Cukup jelas.
 - Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - Cukup jelas.

tidak diisi.

Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.

d.1 Impor BKP

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan

JKP dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan

Palak oleh Pemungut Pajak. Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9

- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar : Daerah Pabean
- Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7. d.8 dan d.9 tidak diisi.
- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Kegiatan Membangun Sendiri
- d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut : Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan3)
- ; Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7,d.8 dan d.9 tidak diisi. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan,

dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada

PKP yang gagal berproduksi dan telah :

diberikan pengemballian Pajak Masukan

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.8 dan d.9 tidak diisi.

baris 1.a. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

			_	
	d.8	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	:	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7</i> dan baris <i>d.9</i> tidak diisi.
	d.9	Tanggung Jawab Secara Renteng	•	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab secara renteng. Baris <i>d.1</i> s. <i>d d.8</i> tidak diisi.
	d.10	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d7 atau d.8 atau d.9)	:	Cukup jelas.
е	. Seha	rusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	:	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
	. PPN	ıngan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar: yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x atau tarif x 1.d.10 atau NIHIL)	:	Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak
h	. Diku	ranci'		terutang.
Б	b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	:	Cukup jelas.
	b.2 b.3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Cukup jelas. Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).
	b.4 b.5	Dibayar dengan NPWP sendiri Lain-lain		Cukup jelas. Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
		Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) rhitungkan:		Cukup jelas.
	c.1 c.2 c.3	SKPKB SKPKBT SKPLB	:	Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. Diisi hanya sebesar pokok pajak.
	c.5	Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP) Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)	1	Diisi hanya sebesar pokok pajak. Cukup jelas.
d	. PPN	yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat UP):	:	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
		Dibayar dengan NPWP sendiri Telah dipungut	:	Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
e	. Juml	Jumlah (d.1+d.2+d.3) lah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) (d.4))	:	Cukup jelas. Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.5) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
f.	Juml f.1	ah penghitungan PPN yang : Kurang Bayar (a-e) Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	:	Berikan tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai. Cukup jelas. Cukup jelas.
ľ	f.3	Nihil (a=e)		Cukup jelas.
a	. Diko . Diko	n Pajak yang sudah mpensasikan ke Masa Pajak berikutnya mpensasikan ke Masa Pajak(karena betulan)		Cukup jelas.
	. Jumi	ah (a+b)	:	Cukup jelas. Berikan tanda " X " (silang) pada [] (kotak) yang sesuai
	PPN yar a. Tidal	ng k/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2)		Cukup jelas.
	(2.f.2	n dibayar/seharusnya tidak terutang 2-3.c)		Cukup jelas.
		((2.f.2=3.c atau (2.f.3)) idministrasi		 Cukup jelas. Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
	umlah y			Berikan tanda " X " (silang) pada
t:	. Lebil	h harus dibayar (4.a+5.d) n dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)	:	Cukup jelas.
	c. Nihil erbilan	(4.c) g:	:	Cukup jelas. Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
C. Kolom O)torisa:	si dan Pengawasan Arus Dokumen	:	
- Dihitu	ung		*	Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteli	ti		:	Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



......

	SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH				
	PAJAR PENJUALAN ATAS DARANG	1)			
Nom Masa	or : Tanggal Pen a Pajak : Tanggal Jatu				
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaks kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:					
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :				
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permu harus dibayar adalah sebagai berikut:	ulaan ²⁾ tersebut diatas,	jumlah yang masih		
		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS		
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali				
2	Telah dibayar				
3	Kurang dibayar (1-2)				
4	Sanksi Administrasi :				
	a. Denda Pasal 7 KUP				
	keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)				
	b. Bunga Pasai 8 (2a) KUP				
	atas pembetulan SPT Masa PPnBM yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar				
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak				
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung				
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)				
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)				
	Terbilang:				

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksl.....,³⁾

- 1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWA			
Nomor	:		
Masa Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

		JUMLAH RUPI	AH MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

- Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1 untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-2
 - untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3
 - untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4
 - : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan. - lembar ke-5
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pengisian	Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum)
- tidak perlu diisi. Nomor
 - : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
- : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Masa Pajak tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret
 - 2017.
 - Tanggal Penerbitan
- : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- : Cukup ielas. NPWP
- : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Kepada Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
- alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan a.n.Direktur Jenderal Paiak STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat Kepala Kantor/ yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kepala Seksi Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak a. Lampiran STP
 - Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan b. STP atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

- * Baris/No.Urut pada STP
 - * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
 - : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok 1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok

pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

- : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. 3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. 4 Sanksi Administrasi
- 5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"



.....

	SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAI	1	
)	
	omor : Tanggal Penerbita asa Pajak : Tanggal Jatuh Ten		
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:	kewajiban Pajak Penj	ualan atas Barang
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah ya berikut:	ng masih harus dibay	ar adalah sebagai
		JUMLAH RUPIA	H MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 30% a.6. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 50% a.8. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 50% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 50% b.7. Dikenakan tarif 50% b.8. Dikenakan tarif 50% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 30% c.2. Dikenakan tarif 30% c.3. Dikenakan tarif 50% c.3. Dikenakan tarif 50% c.4. Dikenakan tarif 50% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 50% c.7. Dikenakan tarif 50% c.8. Dikenakan tarif 50% c.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungu (dikenakan tarif % c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungu (dikenakan tarif %) f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)		

3	PPn BM yang terutang atas:
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
	a.1. Dikenakan tarif 10%
	a.2. Dikenakan tarif 20%
	a.3. Dikenakan tarif 30%
	a.4. Dikenakan tarif 40%
	a.5. Dikenakan tarif 50%
	a.6. Dikenakan tarif 60%
	a.7. Dikenakan tarif 75%
	a.8. Dikenakan tarif%
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
	b. Impor BKP:
	b.1. Dikenakan tarif 10%
	b.2. Dikenakan tarif 20%
	b.3. Dikenakan tarif 30%
	b.4. Dikenakan tarif 40%
	b.5. Dikenakan tarif 50%
	b.6. Dikenakan tarif 60%
	b.7. Dikenakan tarif 75%
	b.8. Dikenakan tarif %
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
	c.1. Dikenakan tarif 10%
	c.2. Dikenakan tarif 20%
	c.3. Dikenakan tarif 30%
	c.4. Dikenakan tarif 40%
	c.5. Dikenakan tarif 50%
	c.6. Dikenakan tarif 60%
	c.7. Dikenakan tarif 75%
	c.8. Dikenakan tarif%
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
	(dikenakan tarif %)
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)
	f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri
	c. STP (pokok kurang bayar)
	d. Lain-lain
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)
6	Sanksi administrasi:
	a. Bunga Pasal
	b. Kenaikan Pasal
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)
	Terbilang:
8	Jumlah kurang bayar yang disetujul berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
٥	Pemeriksaan ³⁾
	Terbilang ³⁾ :

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

LAMPIRAN SKPKB

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

.

		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. Ekspor			
- 1	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri			
	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak			
	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut			
- 1	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM			
	f. Tidak terhutang PPn BM			
- 1	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
- 1	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
- 1	a.1. Dikenakan tarif 10%			
- 1	a.2. Dikenakan tarif 20%			
- 1	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			1
- 1	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
-1	a.7. Dikenakan tarif 75%			
- 1	a.8. Dikenakan tarif%			
- 1	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
- 1	b. Impor BKP:			
- 1	b.1. Dikenakan tarif 10%			
- 1	b.2. Dikenakan tarif 20%			
- 1	b.3. Dikenakan tarif 30%			
- 1	b.4. Dikenakan tarif 40%		35	
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
- 1	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
- 1	b.8. Dikenakan tarif%			
1	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
ł	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10%			
1				
1	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
-	c.4. Dikenakan tarif 40%			
1	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak			
	dipungut (dikenakan tarif %)			
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
	f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			

_				
3	PPn BM yang terutang atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%		ĺ	
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			1
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			1
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak			
	dipungut (dikenakan tarif %)			
	, , , ,	- 1		
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
. 1	f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:			
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	c. STP (pokok kurang bayar)	-		
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)			
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)			
6	Sanksi administrasi:	T. T. O. H. S. H.	1	
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	TWO Exercises in the last		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)			
	Dilet title CVDVD techit stor Impor BVD/Demunquitan Baiak alah Demunquit Baiak/Derol			

- Dilsi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2) Kolom ini tidak diisi dan tidak dicetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.
- 3) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petuniuk Pengisian

4	Demoision	Data/Identitas
1.	Pennisian	PRIITAGONERIELL

Masa Pajak

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut MEWAH..... Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas

Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret

Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka

ditulis 27 Maret 2017.

Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak.

Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup ielas **NPWP** : Cukup jelas

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau Kepada

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n.Direktur Jenderal Pajak Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang

serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan. Kepala Kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPKB Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB * Dilsi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

dipungut sendiri

Pemungut Paiak

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKB. b Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKB.

d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.

e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKB.

PPn BM

Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKB.

g. Jumlah Penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKB.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKB. b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKB. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKB. d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKB. seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Tanggung Jawab Secara Renteng : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKB. (dikenakan tarif%) f. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran SKPKB. 3 PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKB. b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKB. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKB. d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKB. seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Tanggung Jawab Secara Renteng : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKB. (dikenakan tarif%) f. Jumlah PPn BM yang terutang Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran SKPKB. 4 Pajak yang dapat diperhitungkan Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB. 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB. : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB. 6 Sanksi Administrasi Sanksi administrasi dapat berupa: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Dilsi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKB. Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS" 8 Jumlah kurang bayar yang disetujui : Diisi sesuai dengan baris 7 kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Angka 8 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A. Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)". - Terbilang: : Cukup jelas.



	SURAT KETETAPAN PAJAK KUR		
	PAJAK PENJUALAN ATAS	5 BARANG MEWAH	
	***************************************	**************************************	
N	omor : Ta	nnggal Penerbitan :	
M	lasa Pajak : Ta	nggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :	naan kewajiban Pajak Penjualan atas Ba	arang Mewah dari
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut diatas, jumlah ya	ıng masih harus dibayar adalah sebagai b	erikut :
	n	JUMLAH RUPIAH	MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri		
	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak		
	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut		
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM		
	f. Tidak terhutang PPn BM		
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:		
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:		
	a.1. Dikenakan tarif 10%		
	a.2. Dikenakan tarif 20%		
	a.3. Dikenakan tarif 30%		
	a.4. Dikenakan tarif 40%		
	a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60%		
	a.v. Dikenakan tarif 75%		
	a.8. Dikenakan tarif%		
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b. Impor BKP:		
	b.1. Dikenakan tarif 10%		
	b.2. Dikenakan tarif 20%		
	b.3. Dikenakan tarif 30%		
	b.4. Dikenakan tarif 40%		
	b.5. Dikenakan tarif 50%		
	b.6. Dikenakan tarif 60%		
	b.7. Dikenakan tarif 75%		
	b.8. Dikenakan tarif%		
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:		
	c.1. Dikenakan tarif 10%		
	c.2. Dikenakan tarif 20%		
	c.3. Dikenakan tarif 30%		
	c.4. Dikenakan tarif 40%		
	c.5. Dikenakan tarif 50%		
	c.6. Dikenakan tarif 60%		
	c.7. Dikenakan tarif 75%	The state of the s	
	c.8. Dikenakan tarif%	1	
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)		
- 1	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan a	itau tidak	
- 1	dipungut (dikenakan tarif%)		

e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

3	PPn BM yang terutang atas:		
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:		
	a.1. Dikenakan tarif 10%		
	a.2. Dikenakan tarif 20%		
	a.3. Dikenakan tarif 30%		
	a.4. Dikenakan tarif 40%	'	
	a.5. Dikenakan tarif 50%		
	a.6. Dikenakan tarif 60%		
	a.7. Dikenakan tarif 75%		
	a.8. Dikenakan tarif%		
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b. Impor BKP:		
	b.1. Dikenakan tarif 10%		
	b.2. Dikenakan tarif 20%		
	b.3. Dikenakan tarif 30%		
	b.4. Dikenakan tarif 40%		
	b.5. Dikenakan tarif 50%		
	b.6. Dikenakan tarif 60%		
	b.7. Dikenakan tarif 75%		
	b.8. Dikenakan tarif%		
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:		
	c.1. Dikenakan tarif 10%		
	c.2. Dikenakan tarif 20%		
	c.3. Dikenakan tarif 30%		
	c.4. Dikenakan tarif 40%		
	c.5. Dikenakan tarif 50%		
	c.6. Dikenakan tarif 60%		
	c.7. Dikenakan tarif 75%		
	c.8. Dikenakan tarif%		
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)		
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak		
	dipungut (dikenakan tarif%)		
	e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:		
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. STP (pokok kurang bayar)		
	d. Lain-lain	i i	
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
	f. Diperhitungkan :		
	f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		
	f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		
- 1	f.3. SKPLB		
	f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)		
	g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)		
6	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal		
	b. Kenaikan Pasal		
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)		
	Terbilang:		
8	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan		
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
	Terbilang :		
	reizidiy .		

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

¹⁾ Dilsi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

²⁾ Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN						
PAJAK PEI	PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
1)						
Nomor	:					
Masa Pajak	:					
Tanggal Penerbitan	:					
Tanggal Jatuh Tempo	:					

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

		JUML	AH RUPIAH MENURU	JT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. Ekspor			
	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri			
	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak			
	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut			
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM			
-	f. Tidak terhutang PPn BM			
- 1	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
:	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
1	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			1
	a.3. Dikenakan tarif 30%			1
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
1	a.7. Dikenakan tarif 75%			
1	a.8. Dikenakan tarif%			
1	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
1	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
1	b.2. Dikenakan tarif 20%			
1	b.3. Dikenakan tarif 30%			
1	b.4. Dikenakan tarif 40%			
1	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:			
	c.1. Dikenakan tarif 10%)	
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
Т	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	 d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) 			
	e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)			

	T	PM A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	T I	
3		n BM yang terutang atas:		
	a.	PPn BM yang harus dipungut sendiri:		
		a.1. Dikenakan tarif 10%		
		a.2. Dikenakan tarif 20%		
		a.3. Dikenakan tarif 30%		
		a.4. Dikenakan tarif 40%		
		a.5. Dikenakan tarif 50%		
		a.6. Dikenakan tarif 60%		
		a.7. Dikenakan tarif 75%		
		a.8. Dikenakan tarif%		
		a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b.	Impor BKP:		
		b.1. Dikenakan tarif 10%		
		b.2. Dikenakan tarif 20%		
		b.3. Dikenakan tarif 30%		
		b.4. Dikenakan tarif 40%		
		b.5. Dikenakan tarif 50%		
		b.6. Dikenakan tarif 60%		
		b.7. Dikenakan tarif 75%		
		b.8. Dikenakan tarif%		
		b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		
	c.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:		
		c.1. Dikenakan tarif 10%		
		c.2. Dikenakan tarif 20%		
		c.3. Dikenakan tarif 30%		
		c.4. Dikenakan tarif 40%		
		c.5. Dikenakan tarif 50%		
		c.6. Dikenakan tarif 60%		
		c.7. Dikenakan tarif 75%		
		c.8. Dikenakan tarif%		
		c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)		
	d.	Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak		
		dipungut (dikenakan tarif%)		
	e.	Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)		
4		jak yang dapat diperhitungkan:		
		Dibayar dengan NPWP pihak lain		
1 1		Dibayar dengan NPWP sendiri		
		STP (pokok kurang bayar)		
		Lain-lain		
	e.	Jumlah (a+b+c+d)		
		Diperhitungkan:		
		f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		
		f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		
		f.3. SKPLB		
		f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)		
	a.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)		
5	-	n BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)		1
6		nksi administrasi:		
•		Bunga Pasal		
		Kenaikan Pasal		
		Jumlah sanksi administrasi (a+b)	STUDY TO STUDY	
7		mlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)	E. J. Co., San	
	Juli	ment it it are young mount horous assertan (o roto)		

¹⁾ Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

²⁾ Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penverahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-1
 - untuk Seksi Penagihan: - lembar ke-2
 - lembar ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-4
 - lembar ke-5 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

🕏 Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak

dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-Nomor

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak. Masa Pajak

Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Tanggal Penerbitan

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

dilsi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas.

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau Kepada

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

; Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta a.n.Direktur Jenderal Pajak dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Kepala Kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT/Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKBT

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT. Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.

dipungut sendiri

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKBT.

Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT. e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKBT.

pengenaan PPn BM

Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKBT. g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKBT. 2. Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKBT. b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKBT. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKBT. d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKBT. seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKBT. (a atau b atau c) 3 PPn BM yang terutang atas: a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKBT. b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKBT. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKBT. Pajak d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKBT. seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKBT. 4 Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT. 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT. 6 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT: Sanksi administrasi dapat berupa: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKBT. : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH - Terbilang: Rupiah MENURUT FISKUS" Diisi sesuai dengan baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT 8 Jumlah kurang bayar tambahan yang : disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan. Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".

Cukup jelas.

- Terbilang:



	SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWA	AH	
	***************************************	1)	
N	Nomor : Tanggal Penerbi	itan ;	
М	Masa Pajak :		
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjuak Pajak/Pengusaha Kena Pajak:	lan atas Barang N	1ewah dari Wajib
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibaya	r adalah sebagai beri	kut :
		JUMLAH RUPI	AH MENURUT
No.	. URAIAN	PENGUSAHA KENA	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:	РАЈАК	
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri		
	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak		
	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut		
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM		
	f. Tidak terhutang PPn BM		
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:		
- 1	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:		
- 1	a.1. Dikenakan tarif 10%		
- 1	a.2. Dikenakan tarif 20%		
- 1	a.3. Dikenakan tarif 30%		
	a.4. Dikenakan tarif 40%		
- 1	a.5. Dikenakan tarif 50%		
	a.6. Dikenakan tarif 60%		
	a.7. Dikenakan tarif 75%		
	a.8. Dikenakan tarif%		
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b. Impor BKP:		
	b.1. Dikenakan tarif 10%		
	b.2. Dikenakan tarif 20%		
	b.3. Dikenakan tarif 30%		
	b.4. Dikenakan tarif 40%		
	b.5. Dikenakan tarif 50%		
	b.6. Dikenakan tarif 60%		
	b.7. Dikenakan tarif 75%		
- [b.8. Dikenakan tarif%		
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		

	D. La Drief alsh Dannan at Drief.	
	c. Pernungutan Pajak oleh Pernungut Pajak:	
	c.1. Dikenakan tarif 10%	
	c.2. Dikenakan tarif 20%	
	c.3. Dikenakan tarif 30%	
	c.4. Dikenakan tarif 40%	
	c.5. Dikenakan tarif 50%	
	c.6. Dikenakan tarif 60%	
	c.7. Dikenakan tarif 75%	
	c.8. Dikenakan tarif %	
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)	
	d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)	
3	PPn BM yang terutang atas:	
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:	
	a.1. Dikenakan tarif 10%	
	a.2. Dikenakan tarif 20%	
	a.3. Dikenakan tarif 30%	
1	a.4. Dikenakan tarif 40%	
	a.5. Dikenakan tarif 50%	
	a.6. Dikenakan tarif 60%	
	a.7. Dikenakan tarif 75%	
	a.8. Dikenakan tarif%	
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)	
	b. Impor BKP:	
1	b.1. Dikenakan tarif 10%	
	b.2. Dikenakan tarif 20%	
1	b.3. Dikenakan tarif 30%	
	b.4. Dikenakan tarif 40%	
	b.5. Dikenakan tarif 50%	
	b.6. Dikenakan tarif 60%	
	b.7. Dikenakan tarif 75%	
	b.8. Dikenakan tarif%	
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)	
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:	
	c.1. Dikenakan tarif 10%	
	c.2. Dikenakan tarif 20%	
	c.3. Dikenakan tarif 30%	
	c.4. Dikenakan tarif 40%	
	c.5. Dikenakan tarif 50%	
	c.6. Dikenakan tarif 60%	
	c.7. Dikenakan tarif 75%	
	c.8. Dikenakan tarif%	
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)	
	d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)	
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain	
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	
	c. STP (pokok kurang bayar)	
	d. Lain-lain	
_	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)	
5	Jumiah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)	NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

¹⁾ Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

LAMPIRAN SKPN

SI	SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL			
PAJAK	PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			
	1)			
Nomor	:			
Masa Pajak	:			
Tanggal Penerbitan	:			

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

lo.	URAIAN			
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1 Das	sar Pengenaan Pajak atas:			
a.	Ekspor			
b.	Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri			
c.	Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak			
d.	Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut			
e.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM	1		
f.	Tidak terhutang PPn BM	1		
g.	Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2 Das	sar Pengenaan Pajak atas:			
a.	PPn BM yang harus dipungut sendiri:	1		
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%	i I		
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
- 1	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
- 1	Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
- 1	b.3. Dikenakan tarif 30%			
- 1	b.4. Dikenakan tarif 40%	1		
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%		-	
	b.8. Dikenakan tarif%			ľ
- 1	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
1	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
- 1	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)			

		T .	T	
3	PPn BM yang terutang atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
الما	d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:			
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Lain-lain			
_	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		NIHIL	
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)		MIHIL	

¹⁾ Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum)

tidak perlu diisi. Nomor

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Paiak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh Tanggal Penerbitan sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan

tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27

Maret 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas. NPWP : Cukup ielas.

Kepada Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Paiak

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT :

"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Dilsi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut: Baris/No.Urut pada SKPN

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.

b Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN. Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.

dipungut

dibebaskan Penverahan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPN. pengenaan PPn BM

Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPN.

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPN. 2. Dasar Pengenaan Pajak atas:

 a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPN.

Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPN. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPN.

Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPN.

3. PPn BM yang terutang atas: Dipungut Sendiri a. Dilsi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPN.

Impor BKP b. Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPN. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPN. C. Pajak

d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPN. 4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.

5. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPN.



SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

	PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG N	MEWAH	
No	omor : Tanggal Penerl	bitan :	
Ma	asa Pajak :		
I.	Telah dilakukan pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pe Pajak/Pengusaha Kena Pajak:	njualan atas Barang Me	wah dari Wajib
	Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ²⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar berikut :	r/seharusnya tidak terutan	g adalah sebagai
		JUMLAH RUPIAH	MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri		
	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak		
	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut		
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM		
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:		
-	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:		
	a.1. Dikenakan tarif 10%		
	a.2. Dikenakan tarif 20%		
	a.3. Dikenakan tarif 30%		
	a.4. Dikenakan tarif 40%		
	a.5. Dikenakan tarif 50%		
	a.6. Dikenakan tarif 60%		
	a.7. Dikenakan tarif 75%		
	a.8. Dikenakan tarif%		
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b. Impor BKP:		
	b.1. Dikenakan tarif 10%		
	b.2. Dikenakan tarif 20%		
	b.3. Dikenakan tarif 30%		
	b.4. Dikenakan tarif 40%		
- 1	b.5. Dikenakan tarif 50%		
	b.6. Dikenakan tarif 60%		
- 1	b.7. Dikenakan tarif 75%		
- 1	b.8. Dikenakan tarif%		
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:		
	c.1. Dikenakan tarif 10%		
	c.2. Dikenakan tarif 20%		
	c.3. Dikenakan tarif 30%		1
	c.4. Dikenakan tarif 40%		
	c.5. Dikenakan tarif 50%		
	c.6. Dikenakan tarif 60%		
	c.7. Dikenakan tarif 75%		
	c.8. Dikenakan tarif%		
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)		
	d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)	1	

_			
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
4	PPn BM yang terutang atas:		
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:	9	
	a.1. Dikenakan tarif 10%		
	a.2. Dikenakan tarif 20%		
	a.3. Dikenakan tarif 30%		
	a.4. Dikenakan tarif 40%		
	a.5. Dikenakan tarif 50%		
	a.6. Dikenakan tarif 60%		
	a.7. Dikenakan tarif 75%		
	a.8. Dikenakan tarif%		
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)		
	b. Impor BKP:		
	b.1. Dikenakan tarif 10%		
	b.2. Dikenakan tarif 20%		
	b.3. Dikenakan tarif 30%		
	b.4. Dikenakan tarif 40%		
	b.5. Dikenakan tarif 50%		
	b.6. Dikenakan tarif 60%		
	b.7. Dikenakan tarif 75%		
	b.8. Dikenakan tarif%		
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:		
	c.1. Dikenakan tarif 10%		
	c.2. Dikenakan tarif 20%		
	c.3. Dikenakan tarif 30%		
	c.4. Dikenakan tarif 40%		
	c.5. Dikenakan tarif 50%		
	c.6. Dikenakan tarif 60%		
	c.7. Dikenakan tarif 75%		
	c.8. Dikenakan tarif%		
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)		
_	d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)		
5	Pajak yang dapat diperhitungkan:		
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. STP (pokok kurang bayar)		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
	f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB		
	g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):		
	g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain		
	g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3 Telah dipungut		
	g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3)		
	h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))		
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.d)		
V			
	Terbilang:	***************************************	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

Dlisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Nomor Masa Pajak Tanggal Penerbitan :

Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :

		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:			(,	
- 1	a. Ekspor				
	b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri				
-	c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak				
-	d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut				
- 1	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM				
- 1	f. Tidak terhutang PPn BM	1			
- 1	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)				
:	Dasar Pengenaan Pajak atas:				
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			1	
1	a.1. Dikenakan tarif 10%			1	
	a.2. Dikenakan tarif 20%			i .	
-	a.3. Dikenakan tarif 30%			1	
	a.4. Dikenakan tarif 40%				
	a.5. Dikenakan tarif 50%				
	a.6. Dikenakan tarif 60%				
	a.7. Dikenakan tarif 75%			k	
1	a.8. Dikenakan tarif,%				
1	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)				
1	b. Impor BKP:				
1	b.1. Dikenakan tarif 10%				
1	b.2. Dikenakan tarif 20%				
1	b.3. Dikenakan tarif 30%				
1	b.4. Dikenakan tarif 40%				
1	b.5. Dikenakan tarif 50%				
1	b.6. Dikenakan tarif 60%			l'	
1	b.7. Dikenakan tarif 75%				
	b.8. Dikenakan tarif%				
ı	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)				
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:				
1	c.1. Dikenakan tarif 10%				
1	c.2. Dikenakan tarif 20%				
ı	c.3. Dikenakan tarif 30%				
1	c.4. Dikenakan tarif 40%				
	c.5. Dikenakan tarif 50%				
	c.6. Dikenakan tarif 60%				
ı	c.7. Dikenakan tarif 75%				
	c.8. Dikenakan tarif%				
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)				
	d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)				
	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)				

	DDs DM come howshops about			r
4	PPn BM yang terutang atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
l	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
1	a.4. Dikenakan tarif 40%			
1	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			1
	b.1. Dikenakan tarif 10%			()
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)			
5	Pajak yang dapat diperhitungkan:			
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		1	
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Lain-lain			1
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
	f. Diperhitungkan:			
	f.1. SKPLB			
	9. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	1		
	g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	g.3 Telah dipungut			1
	g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3)			
	h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))	I I		
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.d)			
_	Terbilang:			
	. e. e. e. g. a mattanamanamanamanamanamanamanamanamanam			***************

¹⁾ Dilsi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pongielan	Data/Identitas
1.	rengisian	Data/Identitas

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak.

Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu

diisi.

 Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun

penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak

memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).

Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPLB Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA

KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPLB
* Dilsi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.

b Penyerahan yang PPn BM-nya harus ; Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB. dipungut sendiri

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.

Pemungut Pajak
d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB.

pengenaan PPn BM

f. Tidak terutang PPn BM
 g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
 dengan baris 1.f Lampiran SKPLB.
 Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPLB.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri

b. Impor BKP

: Diisi salah satu dari a, atau b, atau c. : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPLB.

Dilsi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPLB.

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut d. Jumlah dasar pengenaan pajak

Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPLB. Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPLB.

3. Penyerahan/impor yang seharusnya tidak :

terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak"

4. PPn BM yang terutang atas:

a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri

b. Impor BKP

: Diisi sesuai dengan baris 4.a Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 4.b Lampiran SKPLB. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 4.c Lampiran SKPLB.

Pajak

d. Jumlah PPn BM yang Terutang 5. Pajak yang dapat diperhitungkan

: Diisi sesuai dengan baris 4.d Lampiran SKPLB. : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.

lebih : 6. Jumlah PPn BM dibayar/seharusnya tidak terutang

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPLB.

- Terbilang:

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS"

	KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JEN	DERAL PAJAK		KODE NOTA
PAJA	NOTA PENGHI K PENJUALAN ATA		ł	
atas : 1 Penyerahan BKP 4 PEROLEHAN YANG PPnBM-NYA TIDA DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGL			PAJAK OLEH PEMUNGUT P NAB SECARA RENTENG	PAJAK
Jenis Ketetapan : 1 STP 4 SKPLB	2 SKPKB 5 SKPN	3 SKPKI	вт	
Dasar Penerbitan Ketetapan : 1 Penelitian	2 Pemeriksaan	3 Pemeriksaan Ulang	4 Pemeriksaan Bukt	ti Permulaan
Dasar Hukum Ketetapan : 1 Pasal 13 6 Pasal 15 Ayat (4)	2 Pasal 13A 7 Pasal 17 Ayat (1)	3 Pasal 14 8 Pasal 17 Ayat (2)	4 Pasal 15 Ayat (1) 9 Pasal 17A	5 Pasal 15 Ayat (3) 10 Pasal 17B
Masa Pajak : s.d. Permohonan (LB) - Nomor : - Tanggał : Tanggał SPT Disampaikan :	Tahun Pajak Tahun Buku Lap. Penelitian/Pe /Pemeriksaan Ula Buper ¹⁾			s.d.
Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP : Alamat : Kode Pos :	Pekerjaan/Usaha KLU (5 digit)		:	
Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut²) a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : c. Tanggal Perolehan Barang Modal :		an Barang Modal yang Dibebaskan atau Tida adinya Pelanggaran	: k Dipungut :	
LIDAYAN			JUMLAH RUPIAH MENL	
URAIAN		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPnBM f. Tidak terutang PPnBM				
g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) 2 Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:				
a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20%				

14D AVAA	JUMLAH RUPIAH MENURUT			
URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾	
Dasar Pengenaan Pajak atas:				
a. Ekspor				
b. Репуетаћап РРпВМ-nya harus dipungut sendiri				
c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak				
d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut				
e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPnBM				
f. Tidak terutang PPnBM				
g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)				
Dasar Pengenaan Pajak atas:				
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:				
a.1. Dikenakan tarif 10%				
a.2. Dikenakan tarif 20%				
a.3. Dikenakan tarif 30%				
a.4. Dikenakan tarif 40%	1			
a.5. Dikenakan tarif 50%				
a.6. Dikenakan tarif 60%				
a.7. Dikenakan tarif 75%				
a.8. Dikenakan tarif%				
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)				
b. Impor BKP:				
b.1. Dikenakan tarif 10%				
b.2. Dikenakan tarif 20%				
b.3. Dikenakan tarif 30%	1			
b.4. Dikenakan tarif 40%				
b.5. Dikenakan tarif 50%				
b.6. Dikenakan tarif 60%				
b.7. Dikenakan tarif 75%				
b.8. Dikenakan tarif%				
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)				
. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak				
c.1. Dikenakan tarif 10%				
c.2. Dikenakan tarif 20%				
c.3. Dikenakan tarif 30%				
c.4. Dikenakan tarif 40%				
c.5. Dikenakan tarif 50%				
c.6. Dikenakan tarif 60%				
c.7. Dikenakan tarif 75%				
c.8. Dikenakan tarif%				
c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)				
Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut				
(dikenakan tarif %)				
. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)				
Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)				
enyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)				
Pn BM terutang atas :				
. Dipungut sendiri:				
a.1. Dikenakan tarif 10%				
a.2. Dikenakan tarif 20%				
a.3. Dikenakan tarif 30%				
a.4. Dikenakan tarif 40%				
a.5. Dikenakan tarif 50%				
a.6. Dikenakan tarif 60%				

		JUMLAH RUPIAH MENURUT	
URAIAN	WAJIB PAJAK	DESIGNATION AND ADDRESS.	
a.7. Dikenakan tarif 75%			19:00:10:01/
a.8. Dikenakan tarif,%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
b. Impor BKP:			
b.1. Dikenakan tarif 10%			
b.2. Dikenakan tarif 20%			
b.3. Dikenakan tarif 30%			
b.4. Dikenakan tarif 40%			
b.5. Dikenakan tarif 50%			
b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75%			
b.8. Dikenakan tarif%			
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Permungutan Palak oleh Pemungut Palak			
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak c.1. Dikenakan tarif 10%			
c.2. Dikenakan tarif 20%			
c.3. Dikenakan tarif 30%			
c.4. Dikenakan tarif 40%			
c.5. Dikenakan tarif 50%			
c.6. Dikenakan tarif 60%			
c.7. Dikenakan tarif 75%			
c.8. Dikenakan tarif%			
c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipun			
(dikenakan tarif %)	igut		
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)			
Pajak yang dapat diperhitungkan :			
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
b. Dibayar dengan NPWP sendiri			
c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
f. Diperhitungkan:			
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
f.3. SKPLB			
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)			
g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain			
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri			
g.3 Telah dipungut			
g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)			
h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f .4) atau (g.4))			
a. Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)			
PPn BM yang: b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5,h-4,f)			
c. Nihil (4.f=5.h)			
Sanksi administrasi :			
a. STP:			
a.1. Denda Pasal 7 KUP			
a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	110000000000000000000000000000000000000		
a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	TANK TO SEE THE SECOND		
a.4. Bunga Pasal 14 (3)KUP	Diameters of persons of the		
D. SKPKB:			
D.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP SKPKBT:			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP c. SKPKBT: c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP c. SKPKBT: c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP c. SKPKBT: c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP l. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP c.5 SKPKBT: c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP l. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c) a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP b.4 Kenaikan Pasal 13A KUP SKPKBT: c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			

DITELITI

¹⁾ Coret yang tidak perlu.
2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPn BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.
- 2 Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
- 3 Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk

	m P: ya	elompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Febr ajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila ha	uari, anya 1	pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan abut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
	-	lembar ke-1	:	dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
	-	embar ke-2	:	untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
į		kuran kertas		
	D	icetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5	" x 13	,,
R D	atu	njuk Pengisian		
		engisian Data/Identitas		
		_		Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
	-		•	Penghitungan.
	-	Kode Nota	:	Disi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
	-	Atas	:	Diberi tanda " X " (silang) pada 🔲 (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan
	-	Untuk Jenis Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
	-	Dasar Penerbitan Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
	-	Dasar Hukum Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
	-	Masa Pajak	:	Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir
	-	Tahun Pajak	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
	-	Tahun Buku		Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
	-	Permohonan (LB) - Nomor	:	Dilsi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
		Permohonan (LB) - Tanggal		Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
	_	Tanggal SPT Disampaikan	:	Cukup jelas.
	-	Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper		Coret yang tidak perlu
		- Nomor	:	Cukup jelas.
		- Tanggal		Cukup jelas.
	-	Nama Wajib Pajak/PKP		Cukup jelas.
	-	NPWP		Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak

yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

: Cukup jelas. - Alamat - Kode Pos : Cukup jelas. Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.

KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan

Usaha Wajib Pajak.

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas. b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas Cukup jelas. c. Tanggal Perolehan Barang Modal Cukup jelas. d. Nilai Perolehan Barang Modal Cukup ielas.

Nilai PPN/PPnBM yang Diisi sebesar jumlah PPN/PPnBM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan Dibebaskan atau Tidak

atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.

f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : Cukup ielas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

- WAJIB PAJAK

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.

- FISKUS

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.

- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah

Baris/Nomor Urut

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor

b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut : sendiri

PPnBM-nva dipungut: c. Penverahan Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut

e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan :

PPn BM

f. Tidak terutang PPnBM

g. Jumlah Penyerahan 2 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

b. Impor BKP

4 PPn BM terutang atas:

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d. Perolehan PPnBM-nya yang seharusnya dibebaskan atau dipungut (dikenakan tarif %)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)

f. Jumlah dasar pengenaan pajak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A.

🕏 Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Cukup jelas.

: Diisi salah satu dari a, atau b atau c.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam negeri yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang

Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris c.1 s.d. c.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

tidak : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPnBM Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan dilsikan pada tempat yang telah disediakan.

: Cukup jelas.

3 Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak : Dlisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

: Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.

a. Dipungut sendiri : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a. b. Impor BKP Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b. c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.

	d.	Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %)		Dilsi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.
	e.	Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)	;	Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.
		Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)	:	Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang Seharusnya Tidak Terutang.
•		Dibayar dengan NPWP pihak lain		Cukup jelas.
		Dibayar dengan NPWP sendiri		Cukup jelas.
				• •
		STP (pokok kurang bayar)		Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol).
		Lain-lain		Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan c
	e.	Jumlah (a+b+c+d)	:	Cukup jelas.
	f.		:	
		f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)	:	Diisi hanya pokok kurang bayar.
		f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)	:	Diisi hanya pokok kurang bayar.
		f.3. SKPLB	:	Diisi hanya pokok pajak.
		f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)	:	Cukup jelas.
	g.	PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	:	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar PPn BM yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris a s.d. f.4 tidak diisi.
		g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	:	Cukup jelas.
		g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	:	Cukup jelas.
		g.3 Telah dipungut	:	Cukup jelas.
		g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)	:	Cukup jelas.
	h.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f.4) atau (g.4))	:	Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)
6	PP	n BM yang :	:	Berikan tanda " X " (silang) pada [(kotak) a atau b atau c yang sesuai
	a.	Tidak/kurang dibayar (4.f-5.h)	:	Cukup jelas.
	b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)	:	Cukup jelas.
	C.	Nihil (4.f=5.h)	:	Cukup jelas.
7	Sai	nksi administrasi	:	 Diisi sesual jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
8	Jur	nlah PPn BM yang:	:	Berikan tanda " X " (silang) pada 🔲 (kotak) a atau b atau c yang sesuai
	a.	Masih harus dibayar (6.a+7.d)		Cukup jelas.
	b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)	:	Cukup jelas.
	C.			Cukup jelas.
	-	Terbilang :	:	Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"
Kolon	Oto	orisasi dan Pengawasan Arus Dokumen	:	
- Dil	nitun	9	:	Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Dit	eliti		:	Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.

C.



	SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI						
N	Nomor : Tanggal Penerbitan :						
М	asa Pajak : Tanggal Jatul	Tempo :					
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan l kewajiban Bea Meterai atas dokumen:	pukti permulaan ¹⁾ a	tas pelaksanaan				
	Nama Wajib Pajak : NPWP :						
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permul masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	aan ¹⁾ tersebut diata	s, jumlah yang				
No.	LIDATAN	JUMLAH RUPI	AH MENURUT				
NO.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS				
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi						
2.	Telah dibayar						
3.	Kurang dibayar (1-2)						
4.	Sanksi Administrasi :						
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai						
	atas dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi	THE RESERVE					
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)						
	Terbilang :						

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

- 1) Coret yang tidak perlu
- Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.5.23.

LAMPIRAN STP

	TAGIHAN PAJAK EA METERAI	
Nomor	:	
Masa Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	;	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Nama Wajib Pajak : NPWP :

П		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK		
1.	Bea Meteral yang harus dilunasi			
2.	Telah dibayar			
3.	Kurang dibayar (1-2)			
4.	Sanksi Administrasi :			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai	to for Wash		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)			

F.5.5.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bea Meterai atas Dokumen.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pen	gisian	Data/	identita :	c

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis

paiak.

- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea

Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama

bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26

April 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas.

- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang Kepala kantor/ menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi

atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

Kepala Seksi,

a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea

Meterai (Formulir F.4.5.77.).

b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

"FISKUS".

Baris/No.Urut pada STP * Diisi sesual dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

1 Pajak harus dilunasi : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat

pokok pajak dilsi dengan tanda " – " (strip).

2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat

pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " – " (strip).

3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.

4 Sanksi Administrasi 📑 Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.

5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.

- Terbilang:: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 Lampiran STP pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

	SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI					
	lomor : Tanggal Penert lasa Pajak : Tanggal Jatuh					
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksa dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP : Dari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang berikut :	naan kewajiban B				
No.	URAIAN	JUMLAH RUPI	AH MENURUT			
	ONALAN	WAJIB PAJAK	FISKUS			
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)	,				
2	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai					
3	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)					
	Terbilang:	***************************************				
4	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan					
	Terbilang:					

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

F.4.5.23.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI			
Nomor	:		
Masa Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		

Nama Wajib Pajak

NPWP

•

		JUML	AH RUPIAH MEN	URUT
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar			
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
	a.1 Benda Meterai			
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai			
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi			
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan			
- 1	a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian			
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. Dikurangi:			
- 1	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi			
	b.2 Lain-lain			
- 1	b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
	c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)			
2.	Sanksl administrasi:			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai	Maria Shipate		
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)			

F.4.5.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) **BEA METERAI**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Bea Meterai atas Dokumen
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 untuk Seksi Penagihan;
 - untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; untuk Seksi Pelayanan; - lembar ke-3
 - lembar ke-4
 - lembar ke-5 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8 5" v 13"

В.

Pemeriksaan

- Terbilang: Cukup jelas.

	Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"						
Petunjuk Pengisian							
1.	1. Pengisian Data/Identitas						
	-	***************************************	j	Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.			
	-	Nomor		Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.			
	-	Masa Pajak	;	Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.			
	-	Tanggal Penerbitan	;	Diisi dengan tanggal diterbitkannya (<i>print out</i>) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.			
	-	Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.			
	-	Nama Wajib Pajak	:	Cukup jelas.			
	-	NPWP	:	Cukup jelas.			
	-	Kepada	:	Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.			
	-	a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor,	:	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.			
2	Pe	ngisian Jumlah Ruplah					
	a.	Lampiran SKPKB	:	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).			
	b.	SKPKB	:	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".			
	*	Baris/No.Urut pada SKPKB	*	Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:			
		Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar		Diisi sesuai dengan baris 1			
		2 Sanksi Administrasi	:	Diisi sesuai dengan baris 2.			
Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar		:	Diisi sesuai dengan baris 3.				
		- Terbilang:	:,	Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"			
	4 Jumlah kurang bayar yang disetujui : Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:						

: - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan

Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

	SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI				
ı	omor : Tanggal Pener				
М	asa Pajak : Tanggal Jatuh	Tempo :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaks dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :	anaan kewajiban E	Bea Meterai atas		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yan berikut :	g masih harus dibay	ar adalah sebagai		
	1184741	JUMLAH RUPI	AH MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS		
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar				
	a. Bea Meteral yang harus dilunasi:				
	a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai				
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi				
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan				
	a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian				
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)				
	b. Dikurangi:				
	b.1 Bea Meteral yang sudah dilunasi				
	b.2 Lain-lain				
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)				
- 1	c. Diperhitungkan:				
	c.1 SKPKB				
	c.2 SKPKBT				
	c.3 SKPLB				
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)				
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)				
	e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)				
2.	Sanksi administrasi:				
	Denda Pasaí 8 (1) UU Bea Meterai				
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)				
Terbi	lang:				
4.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ²⁾				
Terbi	erbilang :				

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI			
Nomor	:		
Masa Pajak	:		
Tanggal Penerbitan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		

Nama Wajib Pajak : NPWP :

		JUMI	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾	
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar				
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:				
	a.1 Benda Meterai				
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai				
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi				
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan				
	a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian				
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)				
	b. Dikurangi:			1	
	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi				
- 1	b.2 Lain-lain				
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)				
	c. Diperhitungkan:				
	c.1 SKPKB				
	c.2 SKPKBT			1	
	c.3 SKPLB				
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)				
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)				
	e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)				
2.	Sanksi administrasi:				
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai	Billian Kanala			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)				

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKBT terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasai 13A

F.4.5.23.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) BEA METERAI

A. Umum

 Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Bea Meterai atas dokumen.

untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pelayanan;

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 :
 - lembar ke-2 - lembar ke-3
 - lembar ke-4
 - lembar ke-4 - lembar ke-5
- Ukuran kertas
 Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.	Pengisian Data/Identitas	
		: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis

Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
NPWP : Cukup jelas.

Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang Kepala kantor, serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

Tanggal Jatuh Tempo

a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).

b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 2.

3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus : Dilsi sesuai dengan baris 3. dibayar

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

4 Jumlah kurang bayar yang disetujui : Dilsi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemeriksaan.

Pemeriksaan. : - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......)"

- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI Nomor Tanggal Penerbitan Masa Pajak Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen: Nama Wajib Pajak NPWP Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : JUMLAH RUPIAH MENURUT No. URAIAN WAJIB PAJAK **FISKUS** Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3) NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL		
BEA METERAI		
Nomor	:	
Masa Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	:	

Nama Wajib Pajak : NPWP :

		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar:			
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
1 1	a.1 Benda Meterai			
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai			
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi			
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan	1 1		
	a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian	1		
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi			
	b.2 Lain-lain			
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
	c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)		NIHIL	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Bea Meterai atas Dokumen
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Bea Meterai adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 - lembar ke-2 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3

: untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

-

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis

pajak.

Masa Pajak

Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya

Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

- NPWP

: Cukup jelas.

- Kepada

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPN

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).

b. SKPN

: Cukup jelas. Dlisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPN

rue · D

Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
 Diisi sesual dengan baris 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI			
	omor : Tanggal Penerbitan Isa Pajak :	1 :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dok	cumen:	
	Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Darl pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seh berikut :	arusnya tidak terutar	ng adalah sebagai
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIA	NH MENURUT
140.	UKALAIV	WAJIB PAJAK	FISKUS
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteralan Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d)) f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)		
-	Terbilang:		•••••

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI				
Nomor	;			
Masa Pajak	:			
Tanggal Penerbitan	:			

Nama Wajib Pajak

NPWP

:

- 1		JUMI	LAH RUPIAH MENU	RUT
No.	URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar:			
- 1	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
	a.1 Benda Meteral			
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai			
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi			
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan			
- 1	a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian			
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. Dikurangi:			
-1	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi			
	b.2 Lain-lain			
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
- 1	c. Diperhitungkan dengan SKPLB			
	d. Bea Meteral yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
- 1	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d))			
	f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) BEA METERAI

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Bea Meterai atas Dokumen

: untuk Seksi Pelayanan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2
 - lembar ke-3
- lembar ke-4 4. Ukuran kertas
 - Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

Т.	Pengisian	Data/Identitas	

- Nomor
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
- Masa Pajak
- : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan

- : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
- ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Wajib Pajak
- **NPWP**

; Cukup jelas (Dilsi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)

Kepada

- Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak ; Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
- alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor,
- : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

Lampiran SKPLB

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).

b. SKPLB

- Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS". Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
- Baris/No.Urut pada SKPLB
 - Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar
- : Diisi sesuai dengan No urut/poin a s.d f.
- Terbilang:
- : Diisi sesuai jumlah rupiah pada poin f pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOE	Œ	NO	ATC

X 					
		NGHITUNG METERAI	AN		
Jenis Ketetapan/ : 1 Keputusan 4	STP 2 SKPK SKPLB 5 SKPN		3 SKP	КВТ	
Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan	: 1 Penelitian 2 Pemeriksaa	an 3 Perm	eriksaan Ulang 4 Pem	eriksaan Bukti Permula	an
Dasar Hukum Ketetapan/	: 1 Pasal 13 2 Pasal 13A	3 Pasa	1 14 4 Pasa	1 15 Ayat (1)	5 Pasal 15 Ayat (3)
Keputusan	6 Pasal 17 Ayat (1) 7 Pasal 17 A	yat (2) 8 Pasa			_ , , , ,
Masa Pajak	; s.d.	Tahun Pajak Lap. Penelitian, Pemeriksaan U Pemeriksaan Bi	lang/ - Tan		
Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Kode Pos	:	Nomor dan Tan Pekerjaan/Usah KLU (5 digit)	iggal Surat Ijin Pembubuh Ia	an : : :	
			1	UMLAH RUPIAH MENUR	Iπ
	URAIAN		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) 2)
	Kurang dibayar / Lebih dibayar				
a. Bea Meteral yang hart a.1 Benda Meteral	JS dilunasi:				
	n mesin teraan meterai				
a.3 Cara lain dengan	ı komputerisasi				
	teknologi percetakan				
a.5 Dengan pemeter a.6 Jumlah (a.1+a.2					
a.6 Jumlah (a.1+a.2	Td.3Td.4Td.5)				
b. Dikurangi:					
b.1 Bea Meteral yang	g sudah dilunasi				
b.2 Lain-lain					
b.3 Jumlah (b.1+b.2)				
c. Diperhitungkan:					
	kurang bayar)				
	c kurang bayar)				_
c.3 SKPLB					
c.4 Jumlah (c.1+c.2-	·c.3)				
d. Bea Meteral yang seha	rusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
e. Jumlah pajak yang dap	pat diperhitungkan ((b3+c.4) atau (d))				
Jumlah penghitungan	f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)				
f. Bea Meteral yang:	f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e	e-a.6)			
	f.3 Nihil (a.6=e)				
2 Sanksi administrasi :					
a. STP:			SPANIS - TABLE		
Denda Pasal 8 (1) UU E	3ea Meteral				
b. SKPKB:					
Denda Pasal 8 (1) UU E	3ea Meterai		No. of Street,		
c. SKPKBT:					
Denda Pasal 8 (1) UU E	Bea Meteral				
d. Jumlah sanksi administ					
	a Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)				
3 Jumlah Bea Meteral yang:	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(1.f.2)			
	c Nihil (1.f.3)				
Terbilang :					
DIHITUNG DITEL	#11				
	I				

Coret yang tidak periu
 Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

				NJUK PENGISIAN IITUNGAN BEA METERAI
		num		
		pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau	ılaar ı Su	
		Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai d		· ·
	3	ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. K menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sa dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak	(ecu paj ma. Janu yar	elunasan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk ak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat uari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret ng terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa
	4	Dibuat dalam rangkap 2 (dua):		
		- lembar ke-1		dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
	_	- lembar ke-2	:	untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
	Ð	Ukuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 1	3"	
_	n - 4	,		
		u njuk Pengisian Pengisian Data/Identitas		
	••	-	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
		- Kode Nota	:	Penghitungan. Disi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
		- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
				Pada aplikasi, <i>checklist</i> pilihan (kotak) untuk jenis ketetapan nomor 3.SKPKBT dan nomor 4.SKPLB dinonaktifkan secara sistem.
		- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
		- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan		Diberi tanda " X " (silang) pada $\hfill \Box$ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
		- Masa Pajak	:	Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
		- Tahun Pajak	;	Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa.
		 Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper 	:	Coret yang tidak perlu.
		- Nomor	:	Cukup jelas.
		- Tanggal		Cukup jelas.
	•	- Nama Wajib Pajak - NPWP		Cukup jelas
	•	· NEWE		Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP)
		- Alamat	:	Cukup jelas
		- Kode Pos		Cukup jelas Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Izin sebagai pelaksana
				pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan,
	•	- Nomor dan Tanggal Surat izin Pembubuhan		Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital atau Surat Izin pelunasan Bea Meterai dengan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi,
		i ortorjaanii oodira		Cukup jelas
		- KLU (5 digit)		Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
2.	. F	Pengisian tabel Nota Penghitungan		
	ŀ	Kolom		
	ł	Colom Jumlah Rupiah Menurut:		
		- WAJIB PAJAK	:	Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
		FIGURE		

- FISKUS
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

- : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut 1. Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dipungut (tarif x 1.a) : Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan. b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi : Cukup jelas. b.2 Lain-lain Diisi dalam hai terdapat kredit pajak selain b.1 b.3 Jumlah (b.1+b.2) : Cukup jelas. c. Diperhitungkan: c.1 **SKPKB** : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. ¢.2 **SKPKBT** Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. SKPLB c.3 Diisi hanya sebesar pokok pajak. Jumlah (c.1+c.2-c.3) c.4 Cukup jelas. d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi dari hasil penghitungan (b.3+c) ((b.3+c) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang: : Berikan tanda " X " (silang) pada 🔲 (kotak) yang sesuai e.1 Kurang Bayar (a.5-d) : Cukup jelas. e.2 Nihil (a.5 = d) : Cukup jelas. 2. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan. : Berikan tanda " X " (silang) pada 3. Jumlah Bea Meterai yang (kotak) yang sesuai a. Masih harus dibayar (1.e.1 +2.c) : Cukup jelas. b. Nihil (1.e.2) Cukup jelas. - Terbilang: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen - Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan. - Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

	SURAT TAGIHAN PAJAK						
	BUNGA / DENDA ¹⁾ PENAGIHAN						
N	lomor : Ta	inggal Penerbitan	:				
М	fasa/Tahun Pajak : Ta	nggal Jatuh Tempo	1.0				
I.	Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak :						
	Nama PKP/Wajib Pajak ;						
	NPWP :						
	•						
II.	Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda ¹⁾ penagihan yang harus dibaya	ar adalah sebagai berikut:					
	 SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Perse Pembayaran Pajak¹⁾; 	tujuan Angsuran Pembayaran	Pajak/Persetujuan Penundaan				
	a. Nomor ;						
	b. Tanggal Penerbitan :						
	c. Tanggal Jatuh Tempo ; d. Jenis Pajak ;						
- 1	2. Dasar pengenaan bunga/denda ¹⁾ :	4)					
	 a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan 	Rp/US\$ ¹⁾					
- 1	Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾						
	b. Telah dibayar ²⁾ :						
	b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$1)					
	b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$1)					
	c. Telah dibayar ³⁾ :						
	c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$1)					
- 1	c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$1)					
	d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2)	Rp/US\$1)					
1	e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1)		Rp/US\$ ¹⁾				
	3. Jumlah yang harus dibayar:		-				
	- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP		Rp/US\$ ¹⁾				
	Terbilang :						
e land	Terbilang :						

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi,4)

- 1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
- Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP. 2)
- 3)
- Dilsi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

 Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

- Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2

: untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4

untuk Seksi Pelayanan;

- 4. Ukuran kertas
 - Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

-

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak
- : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan
- : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27
- Tanggal Jatuh Tempo
- : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 April 2017, maka ditulis 25 April 2017.
- Nama PKP/Wajib Pajak
- _ NDM/D
- Kepada

- : Cukup jelas. Cukup jelas.
- Cukup jela
 - Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor/
 Kepala Seksi,
- : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian STP

Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE	NOTA

							_					
	NOTA PENGHITUNGAN STP BUNGA/DENDA ¹⁾ PENAGIHAN											
Atas		: 🗀	SKPKB	2 SKPKBT				[3]cv n	a mada ada alam		Tales was	
71000	•	_	=	_					embetulan		4 SK. Keberatan	
			Put. Banding	6 Put. Peninja	uan Ken	nbali			ersetujuan ayaran Paja	_	8 SK. Persetujuan Penun Pembayaran Pajak	daan
Dasa	ar Hukum Keteta	pan : [1	Pasal 19 (1) KUP	3 Pasal 25 (9)	KUP							
		[2	Pasal 19 (2) KUP	4 Pasal 27 aya	t (5d) K	UP						
Nam	a Wajib Pajak	:			Pekerj	aan/Us	aha		:			
NPW	rP .	:										
Alan	nat	:			KLU (5	digit)			:			
					Lap. F	Peneliti	an	- Nomor	:			
Kode	Pos	:						- Tanggal	:			
1	a. Nomor b. Tanggal P c. Tanggal J d. Jenis Paja	enerbitan atuh Tempo	: Banding/Put. Peninjau : : : :	an Kemball/Persetu	ijuan Ai	ngsuran	Per	mbayaran Pa	jak/Persetu	juan Penu	undaan Pembayaran Pajak ¹⁾	
2	a. Jumlah yar SK. Kebera	ntan/Put. Banding/Po Pembayaran Pajak/P	nagihan: yar berdasarkan SKPKB, ut. Peninjauan Kembail/ 'ersetujuan Penundaan F	Persetujuan)			Rp/US\$ ¹⁾				
	,	ai dengan jatuh tem	no nelunasan					Rp/US\$1)				
		h jatuh tempo pelur						Rp/US\$1)				
	c. Telah dibay							пру обф			•	
	c.1. Sampa	ii dengan tanggal pe	engajuan keberatan					Rp/US\$1)				
		h tanggal pengajuar						Rp/US\$1)				
			um dibayar lunas (a - b.		.1 - c.2)		Rp/US\$1)				
	e. Dasar Peng	enaan Bunga/Dend	a Penagihan ¹⁾ (b.2 + d)	atau (a - c.1)							Rp/US\$1)	
3	Penghitungan sa	anksi administrasi :										
	a. Bunga Pas	al 19 (1) atau Pas	al 19 (2) KUP:									
- 1	- Masa	s.d.		. =	х	2%	Х	Rp/US\$1)		=	Rp/US\$1)	- 1
						2%		Rp/US\$1)		=	Rp/US\$ ¹⁾	- 1
			*******************************			2%		Rp/US\$1)			Rp/US\$ ¹⁾	- 1
						.2%		Rp/US\$1)	***************************************		Rp/US\$1)	- 1
			***************************************			2% 2%		Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾	***************************************		Rp/US\$ ¹⁾	- 1
			**********************************					Rp/US\$1)	**************		Rp/US\$ ¹⁾ Rp/US\$ ¹⁾	- 1
			*******************************			2%		Rp/US\$ ¹⁾	***************************************		Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	***************************************					Rp/US\$1)	***************************************		Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.			х	2%	х	Rp/US\$1)			Rp/US\$ ¹⁾	
					X		Х	Rp/US\$1)	*************	=	Rp/US\$1)	- 1
		s.d.		₩	х	2%	X	Rp/US\$1)	***************************************		Rp/US\$ ¹⁾	
	Jumlah									F	Rp/US\$ ¹⁾	
	b. Denda Pasa	al 25 (9) KUP		50 %	x Rp/	'US\$ ¹⁾		***************************************		= ,	Rp/US\$ ¹⁾	
	c. Denda Pasa	al 27 (5d) KUP		100 %	x Rp/	'US\$ ¹⁾		******************	******	= F	Rp/US\$ ¹⁾	
							_					
		arus dibayar (3.a a	atau 3.b atau 3.c)							F	Rp/US\$ ¹⁾	
Te	erbilang:	••••••			.,,,,,,,,							
	DIHITUNG	DITEUTI										

Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
 Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
 Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

PETUNJUK PENGISIAN

		NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BUNGA/DENDA PENAGIHAN
A.	Um	num
	1.	Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang
		akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar

2. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.

utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan

3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).

4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1

dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;

- lembar ke-2

untuk Seksi Penagihan.

Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

 Kode Nota Disi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

Atas:

Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar Dasar Hukum Penerbitan:

hukum penerbitan STP.

Nama Wajib Pajak Cukup jelas **NPWP** Cukup jelas Pekerjaan/Usaha Cukup jelas

KLU (5 digit) Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi

Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Alamat Cukup jelas Kode Pos Cukup jelas Lap. Penelitian - Nomor Cukup jelas

- Tanggal Cukup jelas

2 Pengisian STP

Baris/Nomor Urut:

1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/

Banding/Put. Keberatan/Put. Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Pembayaran Angsuran Pajak/

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Coret yang tidak perlu.

a. Nomor Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan .

b. Tanggal Penerbitan Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan. c. Tanggal Jatuh Tempo Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

d. Jenis Pajak dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam

ketetapan/SK/Putusan.

2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda Diisi dengan jumlah rupiah.

a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan

ketetapan/SK/Putusan

b. Telah dibayar:

b.1. Sampai dengan jatuh tempo:

b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan:

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

pelunasan

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo

ketetapan/SK/Putusan.

c. Telah dibayar:

c.1. Sampai dengan tanggal: pengajuan keberatan

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal

pengajuan Keberatan.

c.2. Setelah tanggal pengajuan : keberatan

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan

Keberatan.

d. Jumlah pajak/tagihan yang belum : dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau

Cukup jelas.

(a-c.1-c.2)

e. Dasar pengenaan bunga/denda : (b.2 + d) atau (a - c1)

Cukup jelas.

3 Penghitungan sanksi administrasi:

- Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesualkan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak

yang diterbitkan STP.

a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.

b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP

c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

4 Jumlah yang harus dibayar

Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b,

atau 3.c.

- Terbilang:

Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung

Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Diteliti

Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan

tanggal paraf dibubuhkan.



DAFTAR PENGANTAR **SURAT KETETAPAN PAJAK**

	STP SKPKB SKPKBT	SKPLB	SKPN	SKPPKP
	SK Pembetulan SK Keberatan	Put. Banding	g Put. Peni	njauan Kembali
	S PAJAK : A/TAHUN PAJAK :		DAFTAR PENGANTAR INI DAFTAR PENGANTAR TER	: Dahulu :
No.	PENJELASAN	JUMLAH MENURUT DAFTAR PENGANTAR INI	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR DAHULU	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR INI
1	2	3	4	5
1	Banyaknya surat			
2	Pajak yang terutang			
3	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan			
4	Pajak yang kurang dibayar			
5	Sanksi administrasi			
6	Jumlah yang masih harus dibayar			
	Dibuat dan dikirim Seksi Pelayanan,			Diterima Kepala Seksi ²⁾ ,
Tanda	tangan :			
	Jelas :			
NIP	:			
Tangg	al : ,			-
		Mengetahui Kepala Kantor,		
		NIP.	_	

- Diisi nama KPP yang menerbitkan ketetapan (STP/skp).
 Diisi nama seksi/unit yang menerima ketetapan (STP/skp).

D.4.0.77.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGANTAR SURAT KETETAPAN PAJAK

A. Umum

- 1. Dokumen Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/ menyampaikan ketetapan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak (STP/skp) termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dari Seksi Pelayanan ke seksi/unit terkait. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi Seksi Pelayanan sekaligus sebagai bukti penerimaan formulir ketetapan pajak bagi seksi/unit terkait.
- 2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak, satu jenis ketetapan, termasuk SK.Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman ketetapan pajak. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa ketetapan pajak sepanjang masih dalam satu jenis pajak, satu jenis ketetapan dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak A dan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak B, maka dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar. Namun untuk SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2017, maka harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak meskipun atas Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak atau Wajib Pajak yang sama.
- 3. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau 4 (empat):
 - a. Untuk SKPKB/SKPKBT/STP, termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dibuat dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; - lembar ke-3 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan; - lembar ke-4 untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.

b. Untuk SKPN/SKPLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan; - lembar ke-1

- lembar ke-2 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan; - lembar ke-3 untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas: : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan/mencetak ketetapan

: Diberi tanda " X " (silang) pada . (kotak) yang sesuai dengan jenis (kotak) ketetapan yang telah diterbitkan.

JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

(STP/skp).

MASA/TAHUN PAJAK : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diterbitkan ketetapan. : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu). NO. DAFTAR PENGANTAR INI

NO. DAFTAR PENGANTAR : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk TERDAHULU pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " -- " (strip).

2. Pengisian Tabel

Kolom

No. Urut. Cukup jelas.

JUMLAH MENURUT DAFTAR : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan PENGANTAR INI (a) dengan pajak terutang yang diserahkan menurut daftar pengantar ini.

- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR: Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan TERDAHULU (b) dengan pajak terutang yang telah diserahkan sampai dengan daftar

pengantar terdahulu/sebelumnya.

JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR: Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang diserahkan sampai dengan daftar pengantar ini, atau jumlah (a) dan (b).

Baris

Banyaknya surat : Diisi dengan jumlah lembar ketetapan (STP/skp) yang dikirimkan.

Pajak yang terutang : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang terutang berdasarkan ketetapan. Jumlah pajak yang dapat : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang dapat diperhitungkan

diperhitungkan berdasarkan ketetapan.

Pajak yang kurang dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang kurang dibayar berdasarkan ketetapan.

Sanksi administrasi : Diisi dengan jumlah total rupiah sanksi administrasi berdasarkan ketetapan.

Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim

Kepala Seksi Pelayanan

: Coret yang tidak perlu.

- Diterima

Kepala Seksi......:

Diisi dengan nama Seksi/Unit penerima formulir ketetapan (STP/skp).

Tanda tangan

: Diisi dengan nama Seksi/Unit penerima formulir ketetapan (STP/skp).

: Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.

_ Tanda tangan Nama Jelas

_ NIP _ Tanggal

- Mengetahui Kepala Kantor, Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
Disi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang.

NIP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK.......¹⁾

DAFTAR PENGANTAR

	1000	NOIAF	ENGHITUNGA	N	
STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN	C SVDDVD
	Pembetulan	SK Keberatan			SKPPKP st. Peninjauan Kembali
JENIS PAJAK	;		DAFTAR PENGANTAI DAFTAR PENGANTAI		
No.	NPWP	NAMA WAJI	IB PAJAK	MASA/TAHUN PAJAK	JUMLAH RUPIAH
1	2	3		4	5
		HAJMUL		Huganik Bandari	
	Dibuat dan Kepala Sel	dikirim (Si ²⁾ ,			Diterima Kepala Seksi Pelayanan,
Tanda banan					
Tanda tangan Nama Jelas NIP	:			a	
Tanggal	:				
		Mengetahul Kepala Kantor,			
		NIP.			

- Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
 Diisi nama seksi/unit yang menerbitkan Nota Penghitungan.

D.4.0.77.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGANTAR NOTA PENGHITUNGAN

A. Umum

NIP.

- 1. Dokumen Daftar Pengantar Nota Penghitungan (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/ menyampaikan lembar Nota Penghitungan dari seksi/unit pembuat Nota Penghitungan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan ketetapan pajak (STP/skp) atas hasil penelitian/pemeriksaan. Dokumen Daftar Pengantar Ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sekaligus sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan bagi Seksi Pelayanan.
- 2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan termasuk SK.Pembetulan/ ih ar 16 ın la ıs

		Nota Penghitungan. Dalam satu Dadalam satu jenis pajak dan satu jer (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun dapat dibuatkan satu Daftar Pengani Pajak yang berbeda. Namun untuk harus dibuatkan Daftar Pengantar ya	ıftaı lis l Paja tar Not Ing	uan Kembali, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengirimar Pengantar dapat terdiri dari beberapa Nota Penghitungan sepanjang masi ketetapan. Misalnya Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaak 2017 dan Nota Penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 201 meskipun atas nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahu Papah/Tahu Panghitungan dengan jenis pajak atau jenis ketetapan pajak yang berbed terpisah untuk masing-masing jenis pajak atau jenis ketetapan, meskipun ata jian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama.
	3.	Dibuat dalam rangkap 2 (dua): - lembar ke-1 - lembar ke-2	:	untuk Seksi Pelayanan sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan; untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai bukti pengiriman Nota Penghitungan.
	4.	Ukuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio	ukı	uran 8.5" x 13"
В	. Pe	tunjuk Pengisian		
	1.	Pengisian Data/Identitas		
			:	Dilsi nama Kantor Pelayanan Pajak/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
		- (kotak)		Diberi tanda " X " (silang) pada
		JENIS PAJAKNO. DAFTAR PENGANTAR INI	:	Diisi dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan. Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
		- NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU	:	Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " " (strip).
	2.	Pengisian Kolom		
		- No.	:	No. Urut. Cukup jelas.
		- NPWP	:	Cukup jelas.
		- Nama Wajib Pajak	÷	Cukup jelas.
		- Masa/Tahun Pajak		Cukup jelas.
		- Jumlah Rupiah	**	Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.
C.	Kol	om Otorisasi dan Pengawasan Arus	Do	kumen
	_	Dibuat dan dikirim		
		Kepala Seksi	-	Diisi dengan nama Seksi/Unit pembuat Nota Penghitungan.
		Diterima		gan.
		Kepala Seksi Pelayanan	*	Coret yang tidak perlu.
		Tanda tangan		Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
		Nama Jelas		Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
		NIP		Cukup jelas.
		Tanggal	:	Cukup jelas.
		Mengetahui Kepala Kantor,	:	Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK..

LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nama Wajib Pajak NPWP Nomor Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Bukti Permulaan ²⁾ Tanggal Laporan

Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2		3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2)			
dst.				
		JUMLAH		

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)			
dst.				
		JUMLAH		

3. Jenis Pajak: PPN

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2)		44	5
dst.				
		JUMLAH		

4. Jenis Pajak: PPnBM

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)			
dst.				
		JUMLAH		

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)			
dst.				
		JUMLAH		

Dibuat/dicetak, Petugas

Diteliti, Kepala Seksi

Menetapkan, Kepala Kantor/

Nama ... NIP...

Nama... NIP...

Nama... NIP...

	Distribusi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak				
No	Kepada	Paraf	Tanggal		
1	Wajib Pajak yang bersangkutan;				
2	Seksi Penagihan;				
3	Seksi Pengawasan dan Konsultasi;				
4	Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.				
5	Seksi Pelayanan (Arsip)				

- Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan. Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

A. Umum

- 1. Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:
 - a. Rekapitulasi surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;
 - b. Pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
 - c. Pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.
- 2. Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian /Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Pemulaan
- 3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat
 - b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Surat Tagihan dan/atau

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

- NPWP

: Cukup jelas.

- Nomor Laporan

Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Bukti Permulaan

- Tanggal Laporan

: Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Bukti Permulaan

2. Pengisian Kolom

- Jenis Ketetapan - Nomor Ketetapan

: Cukup jelas.

: Cukup jelas. : Cukup jelas.

- Masa/Tahun Pajak - Jumlah Rupiah

: Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus)

atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

- Dibuat/dicetak

: Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf Petugas pencetak ketetapan

Petugas NIP

Nama

- Diteliti

: Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang

Kepala Seksi NIP

Nama

- Menetapkan

Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat

NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

- Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Penagihan;
- Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi pembuat Nota Penghitungan.
 - Dalam hal unit pemeriksaan berbeda dengan unit penerbit ketetapan, surat ketetapan dikirim ke unit pembuat nothit dan ke Seksi Pemeriksaan di unit yang menerbitkan ketetapan.
- Diisi dengan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan 5



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON	ESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
KANTOR PELAYANAN PAJAK	1)

LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

Nama Wajib Pajak NPWP Nomor Laporan Penelitian / Pemeriksaan/
Pemeriksaan Ulang/
Pemeriksaan Bukti Permulaan ²⁾
Tanggal Laporan

Rekapitulasi Nota Penghitungan

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾		
dst.			
	JUMLAH		

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan

No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)		
dst.			
	JUMLAH		

3. Jenis Pajak: PPN

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2)	·	
dst.			
	JUMLAH		

4. Jenis Pajak: PPnBM

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)		
dst.			
	· JUMLAH		

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$2)
_ 1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2)		
dst.			
	JUMLAH		

Dihitung, Diteliti, Petugas/ Kepala Seksi/ Pemeriksa ²⁾ Supervisor 2)

Mengetahui,

Kepala Kantor/ Kepala Unit/Pejabat

Nama ... NIP...

Nama... NIP...

Nama... NIP....

- Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan. Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

A. Umum

- 1. Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:
 - a. rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan:
 - b. pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 2. Setiap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan yang sama.
 - b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan yang sama.
- 4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- Nama Wajib Pajak

: Cukup jelas.

- NPWP

: Cukup jelas.

- Nomor Laporan

Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan

- Tanggal Laporan

: Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksan

Bukti Permulaan

2. Pengisian Kolom

- Nomor Ketetapan - Masa/Tahun Pajak Cukup jelas. Cukup jelas.

- Jumlah Rupiah

: Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus)

atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota Penghitungan

C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan

Dihitung

Petugas/Pemeriksa

: Diisi dengan nama, NIP, paraf peneliti/pemeriksa dan tanggal paraf dibubuhkan Petugas peneliti/Pemeriksa.

NIP Nama

- Diteliti : Diisi dengan nama, NIP, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf

Kepala Seksi/Supervisor

NIP

dibubuhkan

Nama

- Mengetahui

Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat

NIP

Nama

: Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf

dibubuhkan.